



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM



Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163

Telepon: (0751) 72985, Fax. (0751) 778109

Laman: <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email: sekretariat@law.unand.ac.id

Nomor : 1912/UN16.10.D/PK.01.01/2026 10 – 8 -2026
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Pemberlakuan Kurikulum Program Studi Hukum (S1) Tahun 2026

Yth.

1. Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
2. Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Hukum
3. Ketua Laboratorium Hukum

Universitas Andalas
di Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1825/UN16.R/KPT/I/2026 terkait Penetapan Kurikulum Program Studi Hukum Tahun 2026, dengan ini disampaikan ketentuan keberlakuan kurikulum tersebut sebagai berikut:

1. Kurikulum Program Studi Hukum 2026 dinyatakan berlaku mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027;
2. Kurikulum Program Studi Hukum 2026 diberlakukan bagi mahasiswa angkatan 2024, angkatan 2025, dan angkatan selanjutnya;
3. Mahasiswa angkatan 2023, angkatan 2022, dan angkatan sebelumnya tetap mengacu pada Kurikulum 2021, kecuali untuk mata kuliah pilihan. Mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah pilihan sesuai dengan Kurikulum Program Studi Hukum 2026.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak/Ibu diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan akademik, penawaran mata kuliah, dan pembimbingan akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.

NIP. 19710622 199802 1 001

Tembusan:

1. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Hukum
2. Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Hukum Fakultas Hukum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163
Telp./PABXs: 0751- 71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 71085
http: www.unand.ac.id e-mail: office@unand.ac.id

Nomor : B/1009/UN16.WR1/KR.00.00/2026

29 Juli 2026

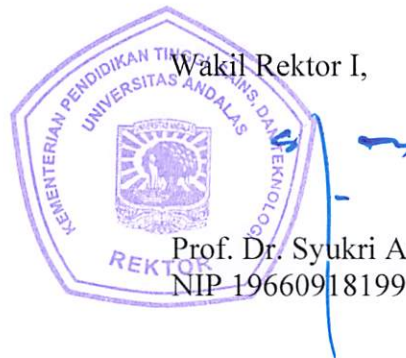
Lamp : Satu berkas

Hal : Keputusan Rektor Penetapan Kurikulum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Padang

Sehubungan dengan penetapan kurikulum Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, bersama ini kami kirimkan SK Rektor Nomor 1825/UN16.R/KPT/I/2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Penetapan Revisi Kurikulum Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas sebagaimana terlampir untuk menjadi pedoman di lingkungan Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wakil Rektor I,

Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng.
NIP 196609181991031005

Tembusan:
Rektor Universitas Andalas (sebagai laporan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp. 0751-71181, 71086, 71087, 71699 ; Fax : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail: office@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR **1825**/UN16.R/KPT/I/2026

TENTANG

PENETAPAN REVISI KURIKULUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 1452/UN16.04.D/KR.00.02/2026 tanggal 25 Juni 2026 perihal Penetapan Kurikulum Program Studi Hukum 2026.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis;
b. bahwa berdasarkan Pasal 195 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Rektor menetapkan pengembangan Kurikulum Program Studi; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana poin a dan b maka perlu ditetapkan revisi kurikulum Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023

- tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 - 2028;
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 10 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Dan Pengembangan Kurikulum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN REVISI KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS.
- KESATU : Kurikulum Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kurikulum ini berlaku bagi penyelenggaraan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juli 2026
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



EFA YONNEDI
NIP 197205021996021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1825/UN16.R/KPT/I/2026
TANGGAL : 24 JULI 2026
TENTANG
PENETAPAN REVISI KURIKULUM PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

**DOKUMEN REVISI KURIKULUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**



**UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

Daftar Isi

I. Deskripsi Umum	1
II. Evaluasi Kurikulum	4
III. Profil Lulusan dan Rumusan Capaian Pembelajaran	7
IV. Kurikulum Program Studi	12
V. Prasyarat dan Penjelasan Mata Kuliah	46
Lampiran	

BAB I

DESKRIPSI UMUM

1.1 IDENTITAS PRODI HUKUM

Tabel 1. 1 Identitas Prodi Hukum

Nama Prodi Hukum	Hukum
Nama dalam Bahasa Inggris	Law
Jenjang Pendidikan	Strata 1 (S1)
Fakultas Pengelola	Hukum
Gelar Akademik yang Diberikan	S.H.
Tahun Pendirian Prodi Hukum	23 Desember 1955
Akreditasi Terakhir (Status, Tahun, Lembaga)	Unggul (U) / Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 6334/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025
Lokasi Kampus	Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang-25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. (0751) 778109
Bahasa Pengantar	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Website Resmi Prodi Hukum	http://www.fhuk.unand.ac.id
SK Pendirian	Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 80016 Tanggal 23 Desember 1955

1.2 VISI DAN MISI

Prodi Hukum memiliki visi dan misi yang diselaraskan dengan visi, misi dan nilai-nilai dasar Universitas Andalas dan visi misi Fakultas Hukum. Visi Prodi Hukum adalah: *"Menjadi Prodi Hukum yang Bermartabat dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2027."* Sedangkan Misi Prodi Hukum adalah: 1) menjadi Prodi Hukum yang bermartabat dan mampu bersaing di Tingkat global tahun 2027; 2) menyelenggarakan pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu hukum; 3) menyelenggarakan pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan hukum yang mumpuni; dan 4) menyelenggarakan pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berintegritas.

Selain itu Prodi Hukum juga memiliki tujuan, yaitu menghasilkan lulusan yang: 1) menguasai ilmu hukum, berintegritas dan mampu bersaing di era globalisasi; 2) memiliki keterampilan hukum yang mumpuni untuk mendukung pengembangan ilmu hukum, menopang agenda pembangunan hukum untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa; 3) memiliki kepedulian dengan masalah sosial kemanusiaan dan lingkungan; dan 4) mampu melaksanakan tugas dan peran yang terkemuka dalam lingkup profesi yang terkait dengan hukum, baik di bidang, konsultasi hukum, perancangan

hukum, penegakan hukum, penyelesaian sengketa maupun peserta studi pada strata yang lebih tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Visi dan Misi

Tingkat	Aspek	Pernyataan
Universitas	Visi	<i>Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat</i>
	Misi	1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan; 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora yang bereputasi internasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional; dan 4. Mengembangkan dan menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan.
Fakultas	Visi	<i>Menjadi Fakultas Hukum yang bermartabat dan mampu bersaing di Tingkat global Tahun 2027</i>
	Misi	1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang berkualitas dan berkarakter untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan; 2. Melaksanakan penelitian hukum yang inovatif untuk menunjang pembangunan nasional dan pengembangan ilmu hukum yang bereputasi internasional; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan solutif sesuai dengan perkembangan ilmu hukum untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 4. Mengembangkan organisasi sesuai dengan prinsip tatakelola yang baik dan mampu beradaptasi serta bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan.

Tingkat	Aspek	Pernyataan
Prodi Hukum	Visi	<i>Menjadi Prodi Hukum yang Bermartabat dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2027</i>
	Misi	1. Menyelenggarakan pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu hukum; 2. Menyelenggarakan pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan hukum yang mumpuni; dan 3. Menyelenggarakan pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berintegritas.
	Tujuan Prodi Hukum	1. Menguasai ilmu hukum, berintegritas dan mampu bersaing di era globalisasi; 2. Memiliki keterampilan hukum yang mumpuni untuk mendukung pengembangan ilmu hukum, menopang agenda pembangunan hukum untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa; 3. Memiliki kepedulian dengan masalah sosial kemanusiaan dan lingkungan; dan 4. Mampu melaksanakan tugas dan peran yang terkemuka dalam lingkup profesi yang terkait dengan hukum, baik di bidang, konsultasi hukum, perancangan hukum, penegakan hukum, penyelesaian sengketa maupun peserta studi pada strata yang lebih tinggi.

BAB II

EVALUASI KURIKULUM

Kurikulum Prodi Hukum disusun dan dikembangkan sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 (empat) tahun sekali. Perubahan kurikulum terakhir kali dilakukan pada tahun 2021. Proses ini melibatkan pemangku kepentingan internal, seperti dosen dan mahasiswa, dan pemangku kepentingan eksternal seperti praktisi di bidang hukum, perwakilan industri hukum, asosiasi profesi, dan alumni. Pendekatan kolaboratif dalam mengembangkan kurikulum ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kebutuhan dunia kerja, serta tantangan hukum di tingkat nasional maupun global. Selain itu, pelibatan multi pihak tersebut juga ditujukan untuk menghasilkan kurikulum yang adaptif terhadap dinamika hukum modern, seperti digitalisasi hukum, hukum lingkungan, dan isu-isu hak asasi manusia kontemporer.

Kurikulum Prodi Hukum juga menyesuaikan dengan program dan metode pembelajaran interaktif, berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan berorientasi pada praktik untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan siap bersaing dalam dunia hukum yang terus berkembang. Dengan demikian, Prodi Hukum tidak hanya menjadi wadah pendidikan, tetapi juga pusat pengembangan pemikiran hukum yang strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kurikulum Prodi Hukum yang berlaku dan dilaksanakan saat ini didasarkan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNAND No.1825/UN/16.R/KPT/2021. Kurikulum ini memuat visi, misi, tujuan pendidikan dan struktur kurikulum yang ada pada Prodi Hukum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi dan berada pada KKNI Level 6. Dalam periode pelaksanaan kurikulum yang ditetapkan pada tahun 2021 telah dilakukan beberapa kali evaluasi yaitu pada tahun 2023 dan 2024, melalui mekanisme: asesmen capaian pembelajaran, analisis pemangku kepentingan (*stakeholders*), *tracer study* alumni dan pengguna lulusan, standar akreditasi nasional dan/atau internasional, dan rencana pengembangan kurikulum ke depan.

Prodi Hukum melakukan evaluasi kurikulum dan pemutakhiran dengan melibatkan para pakar yang ahli di bidang hukum, serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui kegiatan yaitu:

1. Workshop evaluasi kurikulum Prodi Hukum pada tanggal 27 Oktober 2023. Workshop ini mengundang 2 (dua) Narasumber sekaligus Reviewer yang mempunyai keahlian dalam Bidang Ilmu Hukum. Workshop juga dihadiri oleh peserta dari unsur pimpinan Fakultas, Guru Besar dan dosen, pengguna lulusan, perwakilan mahasiswa dan alumni. Nama-nama terlampir (lampiran 1). Hasil dari workshop

- setelah dilakukan evaluasi berupa pemutakhiran Capaian Pembelajaran (CPL).
2. Workshop pada tanggal 7 Desember 2023 mengenai Pembentukan Kurikulum dengan narasumber Kepala Subdirektorat Pengembangan Pendidikan & Inovasi Pembelajaran UNAND, Tim Kurikulum OBE Universitas Andalas, Tim Kurikulum Inti BKSTI. Workshop dihadiri oleh peserta yang terdiri dari pimpinan Fakultas, Staf pendukung, Guru Besar dan Dosen. Workshop membahas penyesuaian visi dan misi Prodi Hukum yang diselaraskan dengan visi dan misi Fakultas.
 3. Lokakarya Revisi Kurikulum Prodi Hukum pada tanggal 26-27 Februari 2024 dengan mengundang Narasumber Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lokakarya ini dari unsur pimpinan Fakultas, Guru Besar dan dosen, pengguna lulusan, perwakilan mahasiswa dan alumni. Nama-nama terlampir (lampiran 1). Hasil Lokakarya berupa evaluasi terhadap landasan filosofis, sosiologis, psikologis dan historis dari pengembangan kurikulum Prodi Hukum. Selain itu, diusulkan juga beberapa mata kuliah penunjang penguasaan dan penerapan ilmu hukum.

Selain melalui workshop dan lokakarya, evaluasi kurikulum juga dilakukan dengan memperhatikan hasil *Tracer Study*. *Tracer study* telah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum sejak tahun 2022, dengan membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup dan terbuka kepada para *stakeholders*. Hasilnya, para *stakeholders* secara umum menyarankan agar adanya mata kuliah yang memberikan kemampuan berbahasa asing yang baik, mata kuliah yang memberikan kesempatan untuk praktek di lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan multinasional dan mata kuliah yang memberikan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahun 2024 Prodi Hukum mengikuti akreditasi FIBAA dan berhasil mendapatkan status terakreditasi internasional. Selanjutnya pada tahun 2025 Prodi Hukum juga mengikuti proses ISK dan memperoleh akreditasi unggul. Capaian akreditasi ini juga mengharuskan untuk dilakukan perbaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pasar kerja sehingga tetap sesuai dengan perkembangan. Untuk itu Prodi hukum perlu memperbaharui kurikulum yang sudah ada saat ini.

Penyusunan kurikulum ini juga memperhatikan rekomendasi Badan Kerja sama Dekan Fakultas Hukum (BKS) tahun 2025 agar kurikulum Prodi Hukum memuat mata kuliah mengenai perkembangan teknologi dan *artificial intelligent*. Selain itu, penyesuaian kurikulum Prodi Hukum juga dilakukan berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi ini, perlu disusun dan ditetapkan kurikulum baru untuk menggantikan kurikulum yang sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya sejumlah aspek yang perlu disempurnakan,

antara lain:

- a. Profil lulusan beserta deskripsinya;
- b. Capaian pembelajaran lulusan (CPL);
- c. Bahan kajian dan mata kuliah, selain mencakup ilmu pengetahuan hukum, juga harus mencakup penguasaan:
 - 1) Ilmu pengetahuan dan teknologi di luar hukum yang dapat menunjang kompetensi di bidang hukum bagi para lulusan;
 - 2) Keterampilan yang diperlukan oleh lulusan untuk menunjang karir mereka di dunia kerja; dan
 - 3) Ilmu pengetahuan yang menjadi penciiri khas dari Prodi Hukum.
- d. Kurikulum berbasis luaran atau *Outcome Based Education (OBE)*; dan
- e. Kurikulum mengakomodasi pola pembelajaran mandiri Kampus Berdampak.

BAB III

PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Penyusunan kurikulum Prodi Hukum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* dimulai dengan perumusan profil lulusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara lain: guru besar, dosen dan mahasiswa maupun pihak eksternal seperti: pengguna lulusan, alumni, wakil dari lembaga-lembaga pemerintahan maupun para pakar di bidang pendidikan khususnya pendidikan hukum. Selain itu, penyusunan kurikulum juga dengan memperhatikan aturan-aturan terkait jaminan mutu sebagaimana dimuat dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Hasilnya adalah tersusunnya profil lulusan Prodi Hukum yang baru yang terdiri dari 4 (empat) poin sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.1. Berdasarkan profil lulusan tersebut, maka dirumuskan 10 (sepuluh) poin CPL sebagaimana yang terdapat dalam Tabel 3.2. Untuk mewujudkan CPL, capaian pembelajaran tersebut dielaborasi ke dalam Indikator Kinerja (IK) sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3. Selanjutnya berdasarkan CPL dan IK yang telah dirumuskan, disusun Bahan Kajian (BK) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1. Bahan Kajian (BK) tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan mata kuliah (MK) sebagaimana tercantum pada Tabel 4.2.

3.1 PENETAPAN PROFIL LULUSAN

Profil lulusan merupakan peran dan fungsi lulusan yang hendak diwujudkan oleh Prodi Hukum di dunia kerja. Terdapat 4 (empat) peran dan fungsi lulusan dimaksud yaitu:

Tabel 3. 1 Profil Lulusan

Kode Profil	Profil Lulusan
PL-01	Sarjana hukum yang menguasai ilmu hukum, berintegritas dan mampu bersaing di era globalisasi;
PL-02	Sarjana hukum yang berkualitas dengan keterampilan hukum yang mumpuni untuk mendukung pengembangan ilmu hukum dan meningkat-kan daya saing bangsa;
PL-03	Sarjana hukum yang mampu menopang agenda pembangunan hukum untuk kesejahteraan masyarakat; dan
PL-04	Sarjana hukum yang peduli dengan masalah sosial kemanusia-an dan lingkungan.

3.2 PENETAPAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Berdasarkan profil lulusan di atas ditetapkan CPL atau kompetensi yang harus dicapai lulusan saat lulus. Ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi Hukum sebagaimana yang terdapat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL-01	Kemampuan menguasai konsep hukum, karakteristik hukum, struktur hukum, sumber hukum, sistem hukum dan sejarah perkembangan hukum.
CPL-02	Kemampuan menguasai asas, norma dan prosedur penyelesaian masalah hukum atau kasus hukum.
CPL-03	Kemampuan menguasai dan menerapkan metode penelitian hukum secara tepat serta mampu menulis laporan penelitian dan dokumen hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai etika akademik.
CPL-04	Kemampuan memahami filsafat hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum secara kontekstual, sistematis dan komprehensif.
CPL-05	Kemampuan menyelesaikan masalah hukum atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif.
CPL-06	Kemampuan merumuskan gagasan secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum serta mampu mengkomunikasikannya sesuai dengan standar etika akademik.
CPL-07	Kemampuan mengambil Keputusan secara tepat, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab serta mampu kerja sama dengan teman sejawat.
CPL-08	Kemampuan untuk bersikap adil, bertanggung jawab, empati, etis dan taat hukum, peduli terhadap kemanusiaan dan lingkungan dalam menjalankan profesi.
CPL-09	Kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum dan teknologi yang memperhatikan nilai kemanusiaan.
CPL-10	Kemampuan menerapkan jiwa kewirausahaan dalam menjalani praktik profesi.

Keterkaitan antara PL dan CPL dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

3.3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA (IK)

Berdasarkan CPL yang telah ditetapkan maka disusunlah Indikator Kinerja (IK) untuk mencapai CPL tersebut. Masing-masing CPL memiliki paling kurang satu indikator. Secara keseluruhan ada 19 indikator sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.3 tentang indikator kinerja berikut ini.

Tabel 3. 3 Indikator Kinerja (IK)

No.	CPL	Deskripsi CPL	Kode Indikator	Deskripsi Indikator
1	CPL-01	Kemampuan menguasai konsep hukum, karakteristik hukum, struktur hukum, sumber hukum, sistem hukum dan sejarah perkembangan hukum.	IK01-01	Mampu merumuskan konsep hukum, karakteristik hukum, struktur hukum, sumber hukum, sistem hukum dan sejarah perkembangan hukum secara tertulis.
			IK01-02	Mampu menyampaikan konsep hukum, karakteristik hukum, struktur hukum, sumber hukum, sistem hukum dan sejarah perkembangan hukum secara tertulis.
2	CPL-02	Kemampuan menguasai asas, norma dan prosedur penyelesaian masalah hukum atau kasus hukum.	IK02-01	Mampu menyampaikan asas, norma dan prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum atau kasus hukum.
3	CPL-03	Kemampuan menguasai dan menerapkan metode penelitian hukum secara tepat serta mampu menulis laporan penelitian dan dokumen hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai etika akademik.	IK03-01	Mampu menentukan metode penelitian hukum penelitian apa yang akan digunakan secara logis dan kritis.
			IK03-02	Mampu menerapkan metode penelitian hukum yang telah ditentukan tersebut.
			IK03-03	Mampu menulis dokumen hukum dengan baik dan benar.
4	CPL-04	Kemampuan memahami filsafat hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum secara kontekstual, sistematis dan komprehensif.	IK04-01	Mampu mempresentasikan filsafat hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum secara kontekstual, sistematis dan komprehensif.
			IK04-02	Mampu menggunakan filsafat hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum sebagai pendekatan untuk menyelesaikan persoalan hukum.
5	CPL-05	Kemampuan menyelesaikan	IK05-01	Mampu menyelesaikan masalah hukum atau kasus

No.	CPL	Deskripsi CPL	Kode Indikator	Deskripsi Indikator
		masalah hukum atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif.		hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis.
			IK05-02	Mampu menerapkan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif.
6	CPL-06	Kemampuan merumuskan gagasan secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum serta mampu mengkomunikasikan nya sesuai dengan standar etika akademik.	IK06-01	Mampu memformulasikan gagasan secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum.
			IK06-02	Mampu mengkomunikasikan gagasan di bidang hukum sesuai dengan standar etika akademik.
7	CPL-07	Kemampuan mengambil Keputusan secara tepat, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab serta mampu kerja sama dengan teman sejawat.	IK07-01	Mampu mengambil Keputusan secara tepat, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab.
			IK07-02	Mampu bekerja sama dengan teman sejawat
8	CPL-08	Kemampuan untuk bersikap adil, bertanggung jawab, empati, etis dan taat hukum, peduli terhadap kemanusiaan dan lingkungan dalam menjalankan profesi.	IK08-01	Mampu menyelesaikan perkara hukum secara adil, bertanggung jawab, empati, etis dan berdasarkan aturan hukum
			IK08-02	Peduli terhadap kemanusiaan dan lingkungan dalam menjalankan profesi
9	CPL-09	Kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum dan teknologi yang	IK09-01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai kemanusiaan
			IK09-02	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam mengimplementasikan ilmu

No.	CPL	Deskripsi CPL	Kode Indikator	Deskripsi Indikator
		memperhatikan nilai kemanusiaan.		pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai kemanusiaan
10	CPL-10	Kemampuan menerapkan jiwa kewirausahaan dalam menjalani praktik profesi.	IK10-01	Mampu menerapkan ide dan kemauan dalam berwirausaha yang terkait dengan praktik profesi utamanya di bidang hukum.

BAB IV
PENETAPAN DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH

4.1 PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Berdasarkan CPL yang telah ditetapkan maka disusunlah Bahan Kajian (BK) sebagaimana yang terdapat dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4. 1 Bahan Kajian

CPL	Bahan Kajian	
CPL-01	BK 1	Pengenalan Ilmu Hukum
	BK 2	Dasar-Dasar Ilmu Hukum
	BK 3	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Perdata
	BK 4	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana
	BK 5	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara
	BK 6	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Internasional
	BK 7	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara
	BK 8	Hukum Acara
	BK 9	Ilmu di Bidang Hukum Perdata
	BK 10	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis
	BK 11	Ilmu di Bidang Hukum Adat dan Islam
	BK 12	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	BK 13	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	BK 14	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	BK 15	Ilmu di Bidang Hukum Administrasi Negara
	BK 16	Ilmu di Bidang Hukum Agraria dan Sumberdaya Alam
	BK 17	Ilmu di Bidang Hukum Kesehatan
CPL-02	BK 18	Hukum dan Masyarakat
	BK 19	Perancangan Dokumen Hukum
	BK 20	Keterampilan Beracara
	BK 21	Klinik dan Kemahiran Hukum
	BK 22	Alternatif Penyelesaian Sengketa
	BK 23	Dasar-Dasar Wirausaha
CPL-03	BK 24	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
CPL-04	BK 18	Hukum dan Masyarakat
	BK 25	Agama, Filsafat dan Etika
CPL-05	BK 18	Hukum dan Masyarakat
	BK 19	Perancangan Dokumen Hukum
	BK 20	Keterampilan Beracara
	BK 21	Klinik dan Kemahiran Hukum
	BK 22	Alternatif Penyelesaian Sengketa
	BK 23	Dasar-Dasar Wirausaha
CPL-06	BK 26	Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi

CPL	Bahan Kajian	
	BK 27	Logika, Penalaran dan Argumentasi
CPL-07	BK 18	Hukum dan Masyarakat
	BK 19	Perancangan Dokumen Hukum
	BK 20	Keterampilan Beracara
	BK 21	Klinik dan Kemahiran Hukum
	BK 22	Alternatif Penyelesaian Sengketa
	BK 23	Dasar-Dasar Wirausaha
CPL-08	BK 18	Hukum dan Masyarakat
	BK 25	Agama, Filsafat dan Etika
CPL-09	BK 28	Teknologi Informatika
CPL-10	BK 23	Dasar-Dasar Wirausaha

Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan Bahan Kajian (BK) dapat dilihat pada **Lampiran 3**. Selanjutnya Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan Mata Kuliah (MK) dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

4.2 PENETAPAN MATA KULIAH

Berdasarkan bahan-bahan kajian yang telah ditetapkan disusunlah berbagai mata kuliah yang terkait dengan bahan kajian tersebut sebagaimana yang terdapat dalam tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4. 2 Bahan Kajian dan Mata Kuliah (MK)

Bahan Kajian		Mata Kuliah
BK 1	Pengenalan Ilmu Hukum	Pengantar Ilmu Hukum
		Pengantar Hukum Indonesia
		Ilmu Negara
BK 2	Dasar-Dasar Ilmu Hukum	Hukum Perdata
		Hukum Islam
		Hukum Adat
		Hukum Administrasi Negara
		Hukum Agraria
		Hukum Internasional
		Hukum Perdata Internasional
		Hukum Pidana
		Kriminologi
BK 3	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Perdata	Hukum Tata Negara
		Hukum Dagang
		Hukum Perjanjian
		Hukum Korporasi
		Hukum Perbankan
BK 4	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana	Hukum Adat Minangkabau
		Hukum tentang Pidana dan Pemidanaan

Bahan Kajian		Mata Kuliah
		Hukum Pidana Khusus
		Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP
BK 5	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara	Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Ilmu Perundang-Undangan
BK 6	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Internasional	Hukum Laut
		Hukum Ekonomi Internasional
		Hukum Hak Kekayaan Intelektual
BK 7	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara	Hukum Pemerintahan Daerah
		Hukum Lingkungan
		Hukum Ketenagakerjaan
		Hukum Pajak
BK 8	Hukum Acara	Hukum Acara Perdata
		Hukum Acara Peradilan Agama
		Hukum Acara Pidana
		Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
		Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
BK 9	Ilmu di Bidang Hukum Perdata	Hukum Jaminan
		Hukum Perwakilan dan Badan Hukum
		Hukum Perumahan dan Kondominium
		Perbandingan Hukum Perdata
		Hukum Waris BW
		Hukum Keluarga dan Perkawinan
BK 10	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis	Hukum Hak Keperdataan Atas Tanah
		Hukum Persaingan Usaha
		Hukum Asuransi
		Hukum Pasar Modal
		Hukum Kepailitan
		Hukum Investasi
		Hukum Perlindungan Konsumen
		Hukum Koperasi dan UKM
		Hukum Pengangkutan
		Hukum Surat-Surat Berharga
BK 11	Ilmu di Bidang Hukum Adat dan Islam	Hukum Pembiayaan
		Hukum Jasa Konstruksi
		Hukum Tanah Adat
		Hukum Jasa Keuangan Syariah
		Hukum Zakat dan Wakaf
		Hukum Ekonomi Islam
BK 12	Ilmu di Bidang Hukum Pidana	Hukum Waris Adat dan Islam
		Perbandingan Hukum Adat
		Hukum Pidana Ekonomi
		Hukum Pidana Korupsi
		Hukum Pidana Adat
		Hukum Pidana Korporasi
		Hukum Pidana Islam

Bahan Kajian		Mata Kuliah
		Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan
		Hukum Pidana Internasional
		Hukum Kepolisian
		Hukum Masyarakat
		Hukum Perlindungan Saksi dan Korban
		Penegakan Hukum Pidana
		Hukum Pidana Narkotika dan Psikotropika
		Perbandingan Hukum Pidana
		Ilmu Kedokteran Kehakiman
		Kriminalistik
		Politik Hukum Pidana
		Hukum Pidana Militer
BK 13	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara	Hukum Konstitusi
		Kekuasaan Kehakiman
		Hukum Pemilihan
		Hukum Keadilan
		Lembaga Perwakilan
		Lembaga Kepresidenan
		Perbandingan Hukum Tata Negara
		Hukum Tata Negara Adat dan Hukum Tata Negara Islam
		Ilmu Politik
		Politik Hukum
		Hukum Pers dan Demokrasi
		Hak Menguji Perundang-Undangan
BK 14	Ilmu di Bidang Hukum Internasional	Hukum Diplomasi Konsuler
		Hukum Humaniter
		Hukum Perjanjian Internasional
		Hukum Organisasi Internasional
		Hukum Udara dan Angkasa
		Hukum Lingkungan Internasional
		Hukum Maritim
		Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata
		Hubungan Internasional
		Studi Kawasan Samudera Hindia
		Hukum Internasional dan Keberlanjutan
BK 15	Ilmu di Bidang Hukum Administrasi Negara	Hukum Pendaftaran Tanah
		Hukum Kepegawaian
		Hukum Perizinan

Bahan Kajian		Mata Kuliah
		Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Hukum Pajak Perusahaan
		Hukum Keuangan Negara dan Daerah
		Hukum Pemerintahan Nagari
		Hukum Pengadaan Tanah
		Hukum Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		Perbandingan Hukum Administrasi Negara
		Hukum Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
		Hukum Keterbukaan Informasi Publik
		Hukum Penempatan Pekerja Migran
BK 16	Ilmu di Bidang Hukum Agraria dan Sumberdaya Alam	Hukum Tata Ruang
		Hukum Kehutanan dan Konservasi SDA
		Hukum Pertambangan
		Hukum Sumberdaya Air
		Hukum Pertanian dan Perkebunan
		Hukum Reforma Agraria
		Hukum Pemanfaatan Ruang Udara
		Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Hukum Minyak dan Gas Bumi
		Hukum Panas Bumi
		Hukum Sumber Daya Energi
BK 17	Ilmu di Bidang Hukum Kesehatan	Hukum Kesehatan
BK 18	Hukum dan Masyarakat	Kuliah Kerja Nyata
		Sosiologi Hukum
		Psikologi Hukum
		Bantuan Hukum
		Hukum Kebencanaan
BK 19	Perancangan Dokumen Hukum	Hukum Perancangan Kontrak
		Diklat Kemahiran Hukum Internasional
		Perancangan Perundang-Undangan
BK 20	Keterampilan Beracara	Praktik Peradilan Perdata
		Praktik Peradilan Pidana
		Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi
		Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
		Klinik Hukum Perdata

Bahan Kajian		Mata Kuliah
BK 21	Klinik dan Kemahiran Hukum	Klinik Anti Korupsi
		Klinik Hukum Lingkungan
		Klinik Pemilu Dan Kepartaian
		Klinik Etik dan Advokasi Peradilan
		Klinik Hukum Ketenagakerjaan
		Klinik Perundang-Undangan
		Klinik Alternatif Penyelesaian Sengketa
		Klinik Perlindungan Kelompok Rentan
		Klinik Advokasi Dan Bantuan Hukum
BK 22	Alternatif Penyelesaian Sengketa	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa
		Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
BK 23	Dasar-Dasar Wirausaha	Kewirausahaan
BK 24	Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
		Tugas Akhir
BK 25	Agama, Filsafat Dan Etika	Pendidikan Agama
		Pancasila
		Pendidikan Kewarganegaraan
		Filsafat Hukum
		Etika Profesi Hukum
BK 26	Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi	Bahasa Indonesia
		Bahasa Inggris
		Bahasa Inggris Hukum
		Bahasa Belanda
BK 27	Logika, Penalaran dan Argumentasi	Penalaran dan Retorika Hukum
BK 28	Teknologi Informatika	Hukum Transaksi Elektronik
		Hukum Perlindungan Data Pribadi
		Hukum Teknologi dan AI
		Literasi Digital Untuk Hukum
		Transformasi Digital Bidang Hukum

Distribusi Bahan Kajian (BK) ke Mata Kuliah (MK) dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Masing-masing mata kuliah selanjutnya diberi kode sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 2346/UN.R/KPT/2020 Tentang Pengkodean Mata Kuliah . Struktur Pengkodean Mata Kuliah berdasarkan SK Rektor di atas Adalah sebagai berikut:

1. Tiga karakter alfabet ditulis dalam huruf kapital menunjukkan kelompok mata kuliah, untuk kelompok:

- a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang dikelola oleh Universitas diberi kode MWU;
 - b. Mata Kuliah lain yang dikelola oleh Universitas diberi kode AND Mata Kuliah Wajib/Pilihan yang dikelola Prodi Hukum diberi kode HKD;
 - c. Mata Kuliah Wajib/Pilihan yang dikelola Departemen diberi kode masing-masing: HKP (dikelola Departemen Hukum Perdata), HKN (dikelola Departemen Hukum Pidana), HKT (dikelola Departemen Hukum Tata Negara), HKI (dikelola Departemen Hukum Internasional), dan HKA (dikelola Departemen Hukum Administrasi Negara); dan
 - d. Mata Kuliah yang dikelola oleh Laboratorium Hukum diberi kode HKL.
2. Lima Karakter Numerik (Angka) menunjukkan:
- a. Angka pertama, angka 6 menunjukkan Level Program Sarjana berdasarkan Level KKNI.
 - b. Angka kedua menunjukkan Semester (Ganjil atau Genap) dimana mata kuliah diajarkan, angka 0 menunjukkan mata kuliah bisa diajarkan di semester ganjil maupun genap, angka 1 menunjukkan semester ganjil dan angka 2 semester genap.
 - c. Angka ketiga dapat berupa:
 - 1) Angka 1 untuk mata kuliah wajib di bawah pengelolaan Prodi, Departemen maupun Laboratorium.
 - 2) Angka 2 untuk mata kuliah pilihan di bawah pengelolaan Prodi, Departemen maupun Laboratorium.
 - d. Angka keempat dan kelima menunjukkan nomor urut mata kuliah sesuai dengan angka 3 di atas.

Tabel 4. 3 Pengelola, Mata Kuliah, Kode dan Bahan Kajian

Pengelola Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kode Matkul	Bahan Kajian
Universitas	Kuliah Kerja Nyata	AND60101	Hukum dan Masyarakat
	Kewirausahaan	AND60102	Dasar-Dasar Wirausaha
	Pendidikan Agama	MWU60101	Agama, Filsafat dan Etika
	Pancasila	MWU60102	Agama, Filsafat dan Etika
	Pendidikan Kewarganegaraan	MWU60103	Agama, Filsafat dan Etika
	Bahasa Indonesia	MWU60104	Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi
Prodi Hukum	Pengantar Ilmu Hukum	HKD61101	Pengenalan Ilmu Hukum
	Pengantar Hukum Indonesia	HKD61102	Pengenalan Ilmu Hukum
	Bahasa Inggris	HKD61103	Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi

Pengelola Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kode Matkul	Bahan Kajian
	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	HKD61104	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
	Filsafat Hukum	HKD61105	Agama, Filsafat dan Etika
	Penalaran dan Retorika Hukum	HKD62212	Logika, Penalaran dan Argumentasi
	Etika Profesi Hukum	HKD62106	Agama, Filsafat Dan Etika
	Tugas Akhir	HKD60107	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
	Hukum Kesehatan	HKD62208	Ilmu di Bidang Hukum Kesehatan
	Bantuan Hukum	HKD62209	Hukum dan Masyarakat
	Hukum Teknologi dan AI	HKD62210	Teknologi Informatika
	Bahasa Belanda	HKD62211	Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi
	Hukum Kebencanaan	HKD62213	Ilmu di Bidang Hukum Agraria dan Sumberdaya Alam
	Sosiologi Hukum	HKD61214	Hukum dan Masyarakat
	Hukum Perlindungan Data Pribadi	HKD61215	Teknologi Informatika
	Psikologi Hukum	HKD61216	Hukum dan Masyarakat
	Literasi Digital Untuk Hukum	HKD61217	Teknologi Informatika
	Transformasi Digital Bidang Hukum	HKD61218	Teknologi Informatika
Departemen Hukum Perdata	Hukum Islam	HKP62101	Dasar-Dasar Ilmu Hukum
	Hukum Perdata	HKP62102	Dasar-Dasar Ilmu Hukum
	Hukum Dagang	HKP62103	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Perdata
	Hukum Acara Perdata	HKP61104	Hukum Acara

Pengelola Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kode Matkul	Bahan Kajian
	Hukum Perjanjian	HKP61105	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Perdata
	Hukum Korporasi	HKP61106	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Perdata
	Hukum Adat	HKP61107	Dasar-Dasar Ilmu Hukum
	Hukum Acara Peradilan Agama	HKP62108	Hukum Acara
	Hukum Perancangan Kontrak	HKP62109	Perancangan Dokumen Hukum
	Hukum Perbankan	HKP61111	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Perdata
	Hukum Adat Minangkabau	HKP61110	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Perdata
	Hukum Jaminan	HKP62112	Ilmu di Bidang Hukum Perdata
	Hukum Perwakilan dan Badan Hukum	HKP62113	Ilmu di Bidang Hukum Perdata
	Hukum Perumahan dan Kondominium	HKP62114	Ilmu di Bidang Hukum Perdata
	Perbandingan Hukum Perdata	HKP62115	Ilmu di Bidang Hukum Perdata
	Hukum Waris BW	HKP62116	Ilmu di Bidang Hukum Perdata
	Hukum Keluarga dan Perkawinan	HKP62117	Ilmu di Bidang Hukum Perdata
	Hukum Persaingan Usaha	HKP62118	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis
	Hukum Asuransi	HKP62119	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis
	Hukum Pasar Modal	HKP62120	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis
	Hukum Kepailitan	HKP62121	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis
	Hukum Investasi	HKP62122	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis
	Hukum Perlindungan Konsumen	HKP62123	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis
	Hukum Tanah Adat	HKP62124	Ilmu di Bidang Hukum Adat dan Islam

Pengelola Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kode Matkul	Bahan Kajian
	Hukum Jasa Keuangan Syariah	HKP62125	Ilmu di Bidang Hukum Adat dan Islam
	Hukum Zakat dan Wakaf	HKP62126	Ilmu di Bidang Hukum Adat dan Islam
	Hukum Ekonomi Islam	HKP62127	Ilmu di Bidang Hukum Adat dan Islam
	Hukum Waris Adat dan Islam	HKP62128	Ilmu di Bidang Hukum Adat dan Islam
	Perbandingan Hukum Adat	HKP62129	Ilmu di Bidang Hukum Adat dan Islam
	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa	HKP62230	Alternatif Penyelesaian Sengketa
	Hukum Transaksi Elektronik	HKP62231	Teknologi Informatika
	Hukum Surat-Surat Berharga	HKP62232	Ilmu Di bidang Hukum Bisnis
	Hukum Hak Keperdataan Atas Tanah	HKP62233	Ilmu di Bidang Hukum Perdata
	Hukum Koperasi dan UKM	HKP61234	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis
	Hukum Pengangkutan	HKP61235	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis
	Hukum Pembiayaan	HKP61236	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis
	Hukum Jasa Konstruksi	HKP61237	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis
Dept Hukum Pidana	Hukum Pidana	HKN62101	Dasar-Dasar Ilmu Hukum
	Kriminologi	HKN61106	Dasar-Dasar Ilmu Hukum
	Hukum Acara Pidana	HKN61102	Hukum Acara
	Hukum tentang Pidana dan Pemidanaan	HKN61103	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana
	Hukum Pidana Khusus	HKN62104	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana

Pengelola Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kode Matkul	Bahan Kajian
	Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP	HKN62105	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana
	Hukum Pidana Ekonomi	HKN62107	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Hukum Pidana Korupsi	HKN62108	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Hukum Pidana Adat	HKN62109	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Hukum Pidana Korporasi	HKN62110	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Hukum Pidana Islam	HKN62111	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	HKN62112	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Hukum Pidana Internasional	HKN62213	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Hukum Kepolisian	HKN62214	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Hukum Masyarakat	HKN62215	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Hukum Perlindungan Saksi dan Korban	HKN62216	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Penegakan Hukum Pidana	HKN62217	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Hukum Pidana Narkotika dan Psikotropika	HKN62218	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Politik Hukum Pidana	HKN61219	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Kriminalistik	HKN61220	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Ilmu Kedokteran Kehakiman	HKN61221	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Perbandingan Hukum Pidana	HKN61222	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
	Hukum Pidana Militer	HKN61223	Ilmu di Bidang Hukum Pidana
Departemen HTN	Ilmu Negara	HKT61101	Pengenalan Ilmu Hukum
	Hukum Tata Negara	HKT62102	Dasar-Dasar Ilmu Hukum
	Hukum dan Hak Asasi Manusia	HKT62104	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara

Pengelola Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kode Matkul	Bahan Kajian
	Ilmu Perundang-Undangan	HKT61103	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara
	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	HKT62105	Hukum Acara
	Perancangan Perundang-Undangan	HKT62106	Perancangan Dokumen Hukum
	Politik Hukum	HKT61107	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	Hukum Konstitusi	HKT62108	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	Kekuasaan Kehakiman	HKT62109	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	Lembaga Perwakilan	HKT62110	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	Lembaga Kepresidenan	HKT62111	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	Perbandingan Hukum Tata Negara	HKT62112	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	Hukum Tata Negara Adat dan Hukum Tata Negara Islam	HKT62214	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	Ilmu Politik	HKT62215	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	Hukum Kepemiluan	HKT62113	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	Hukum Pers dan Demokrasi	HKT61216	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	Hukum Kepartaian	HKT61217	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
	Hak Menguji Perundang-Undangan	HKT61218	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara

Pengelola Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kode Matkul	Bahan Kajian
	Hukum Kelembagaan Negara	HKT61219	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara
Departemen Hukum Internasional	Hukum Internasional	HKI62101	Dasar-Dasar Ilmu Hukum
	Hukum Laut	HKI61102	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Internasional
	Hukum Perdata Internasional	HKI61103	Dasar-Dasar Ilmu Hukum
	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	HKI62104	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Internasional
	Hukum Ekonomi Internasional	HKI62105	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Internasional
	Diklat Kemahiran Hukum Internasional	HKI62106	Perancangan Dokumen Hukum
	Hukum Diplomatik Konsuler	HKI62107	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	Hukum Humaniter	HKI62108	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	Hukum Perjanjian Internasional	HKI62109	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	Bahasa Inggris Hukum	HKI62110	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	Hukum Organisasi Internasional	HKI62111	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	Hukum Udara dan Angkasa	HKI62212	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	HKI62213	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	Hubungan Internasional	HKI62214	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	Hukum Internasional dan Keberlanjutan	HKI62215	Ilmu di Bidang Hukum Internasional

Pengelola Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kode Matkul	Bahan Kajian
	Hukum Lingkungan Internasional	HKI61216	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	Hukum Kemaritiman	HKI61217	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata	HKI61218	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
	Studi Kawasan Samudera Hindia	HKI61219	Ilmu di Bidang Hukum Internasional
Departemen Hukum Administrasi Negara	Hukum Administrasi Negara	HKA62101	Dasar-Dasar Ilmu Hukum
	Hukum Agraria	HKA61102	Dasar-Dasar Ilmu Hukum
	Hukum Ketenagakerjaan	HKA61103	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara
	Hukum Lingkungan	HKA62104	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara
	Hukum Pemerintahan Daerah	HKA62105	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara
	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	HKA62106	Hukum Acara
	Hukum Pajak	HKA61108	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara
	Hukum Kepegawaian	HKA62108	Ilmu di Bidang Hukum Administrasi Negara
	Hukum Perizinan	HKA62109	Ilmu di Bidang Hukum Administrasi Negara
	Hukum Pendaftaran Tanah	HKA62110	Ilmu di Bidang Hukum

Pengelola Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kode Matkul	Bahan Kajian
			Administrasi Negara
	Hukum Kehutanan dan Konservasi SDA	HKA62111	Ilmu di Bidang Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Pertambangan	HKA62112	Ilmu di Bidang Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	HKA62113	Ilmu di Bidang Hukum Administrasi Negara
	Hukum Tata Ruang	HKA62114	Ilmu di Bidang Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Pajak Perusahaan	HKA62115	Ilmu di Bidang Hukum Administrasi Negara
	Hukum Sumberdaya Air	HKA62116	Ilmu di Bidang Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Pengadaan Tanah	HKA62117	Ilmu di Bidang Hukum Administrasi Negara
	Hukum Keuangan Negara dan Daerah	HKA62218	Ilmu di Bidang Hukum Administrasi Negara
	Hukum Pertanian dan Perkebunan	HKA62219	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	HKA62220	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Pemerintahan Berbasis Elektronik	HKA62221	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam

Pengelola Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kode Matkul	Bahan Kajian
	Perbandingan Hukum Administrasi Negara	HKA62222	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Reforma Agraria	HKA62223	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Pemerintahan Nagari	HKA62224	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Sumber Daya Energi	HKA61225	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	HKA61226	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Keterbukaan Informasi Publik	HKA61227	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Penempatan Pekerja Migran	HKA61228	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HKA61229	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Pemanfaatan Ruang Udara	HKA61230	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Minyak dan Gas Bumi	HKA61231	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
	Hukum Panas Bumi	HKA61232	Ilmu di Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam
Laboratorium Hukum	Praktik Peradilan Perdata	HKL61101	Keterampilan Beracara

Pengelola Mata Kuliah	Mata Kuliah	Kode Matkul	Bahan Kajian
	Praktik Peradilan Pidana	HKL61102	Keterampilan Beracara
	Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi	HKL61103	Keterampilan Beracara
	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	HKL61104	Keterampilan Beracara
	Klinik Hukum Perdata	HKL62205	Klinik dan Kemahiran Hukum
	Klinik Anti Korupsi	HKL62206	Klinik dan Kemahiran Hukum
	Klinik Hukum Lingkungan	HKL62207	Klinik dan Kemahiran Hukum
	Klinik Pemilu dan Kepartaian	HKL62208	Klinik dan Kemahiran Hukum
	Klinik Etik dan Advokasi Peradilan	HKL62209	Klinik Dan Kemahiran Hukum
	Klinik Hukum Ketenagakerjaan	HKL61210	Klinik Dan Kemahiran Hukum
	Klinik Perundang-Undangan	HKL61211	Klinik Dan Kemahiran Hukum
	Klinik Alternatif Penyelesaian Sengketa	HKL61212	Klinik Dan Kemahiran Hukum
	Klinik Perlindungan Kelompok Rentan	HKL61213	Klinik Dan Kemahiran Hukum
	Klinik Advokasi dan Bantuan Hukum	HKL61214	Klinik Dan Kemahiran Hukum

Tabel 4. 4 Bahan Kajian , Kode dan Mata Kuliah (MK)

Bahan Kajian	Mata Kuliah	Kode Matkul
1	Pengantar Ilmu Hukum	HKD61101
1	Pengantar Hukum Indonesia	HKD61102
1	Ilmu Negara	HKT61101
2	Hukum Perdata	HKP62102
2	Hukum Islam	HKP62101
2	Hukum Adat	HKP61107
2	Hukum Administrasi Negara	HKA62101
2	Hukum Agraria	HKA61102
2	Hukum Internasional	HKI62101
2	Hukum Perdata Internasional	HKI61103
2	Hukum Pidana	HKN62101
2	Kriminologi	HKN61106
2	Hukum Tata Negara	HKT62102
3	Hukum Dagang	HKP62103
3	Hukum Perjanjian	HKP61105
3	Hukum Korporasi	HKP61106
3	Hukum Perbankan	HKP61111
3	Hukum Adat Minangkabau	HKP61110
4	Hukum tentang Pidana dan Pemidanaan	HKN61103
4	Hukum Pidana Khusus	HKN62104
4	Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP	HKN62105
5	Hukum dan Hak Asasi Manusia	HKT62104
5	Ilmu Perundang-Undangan	HKT61103
6	Hukum Laut	HKI61102
6	Hukum Ekonomi Internasional	HKI62105
6	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	HKI62104
7	Hukum Pemerintahan Daerah	HKA62105
7	Hukum Lingkungan	HKA62104
7	Hukum Ketenagakerjaan	HKA61103
7	Hukum Pajak	HKA61108
8	Hukum Acara Perdata	HKP61104
8	Hukum Acara Peradilan Agama	HKP62108
8	Hukum Acara Pidana	HKN61102
8	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	HKT62105
8	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	HKA62106
9	Hukum Jaminan	HKP62112
9	Hukum Perwakilan dan Badan Hukum	HKP62113
9	Hukum Perumahan dan Kondominium	HKP62114
9	Perbandingan Hukum Perdata	HKP62115
9	Hukum Waris BW	HKP62116
9	Hukum Keluarga dan Perkawinan	HKP62117
9	Hukum Hak Keperdataan Atas Tanah	HKP62233

Bahan Kajian	Mata Kuliah	Kode Matkul
10	Hukum Persaingan Usaha	HKP62118
10	Hukum Asuransi	HKP62119
10	Hukum Pasar Modal	HKP62120
10	Hukum Kepailitan	HKP62121
10	Hukum Investasi	HKP62122
10	Hukum Perlindungan Konsumen	HKP62123
10	Hukum Koperasi dan UKM	HKP61234
10	Hukum Pengangkutan	HKP61235
10	Hukum Surat-Surat Berharga	HKP62232
10	Hukum Pembiayaan	HKP61236
10	Hukum Jasa Konstruksi	HKP61237
11	Hukum Tanah Adat	HKP62124
11	Hukum Jasa Keuangan Syariah	HKP62125
11	Hukum Zakat dan Wakaf	HKP62126
11	Hukum Ekonomi Islam	HKP62127
11	Hukum Waris Adat dan Islam	HKP62128
11	Perbandingan Hukum Adat	HKP62129
12	Hukum Pidana Ekonomi	HKN62107
12	Hukum Pidana Korupsi	HKN62108
12	Hukum Pidana Adat	HKN62109
12	Hukum Pidana Korporasi	HKN62110
12	Hukum Pidana Islam	HKN62111
12	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	HKN62112
12	Hukum Pidana Internasional	HKN62213
12	Hukum Kepolisian	HKN62214
12	Hukum Pemasyarakatan	HKN62215
12	Hukum Perlindungan Saksi dan Korban	HKN62216
12	Penegakan Hukum Pidana	HKN62217
12	Hukum Pidana Narkotika dan Psikotropika	HKN62218
12	Politik Hukum Pidana	HKN61219
12	Kriminalistik	HKN61220
12	Ilmu Kedokteran Kehakiman	HKN61221
12	Perbandingan Hukum Pidana	HKN61222
12	Hukum Pidana Militer	HKN61223
13	Hukum Konstitusi	HKT62108
13	Kekuasaan Kehakiman	HKT62109
13	Hukum Kepemiluan	HKT62113
13	Hukum Kepartaian	HKT61217
13	Lembaga Perwakilan	HKT62110
13	Lembaga Kepresidenan	HKT62111
13	Perbandingan Hukum Tata Negara	HKT62112
13	Hukum Tata Negara Adat dan Hukum Tata Negara Islam	HKT62214

Bahan Kajian	Mata Kuliah	Kode Matkul
13	Ilmu Politik	HKT62215
13	Politik Hukum	HKT61107
13	Hukum Pers dan Demokrasi	HKT61216
13	Hak Menguji Perundang-Undangan	HKT61218
13	Hukum Kelembagaan Negara	HKT61219
14	Hukum Diplomatik Konsuler	HKI62107
14	Hukum Humaniter	HKI62108
14	Hukum Perjanjian Internasional	HKI62109
14	Hukum Organisasi Internasional	HKI62111
14	Hukum Udara dan Angkasa	HKI62212
14	Hukum Lingkungan Internasional	HKI61216
14	Hukum Kemaritiman	HKI61217
14	Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata	HKI61218
14	Hubungan Internasional	HKI62214
14	Studi Kawasan Samudera Hindia	HKI61219
14	Hukum Internasional dan Keberlanjutan	HKI62215
15	Hukum Pendaftaran Tanah	HKA62110
15	Hukum Kepegawaian	HKA62108
15	Hukum Perizinan	HKA62109
15	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	HKA62113
15	Hukum Pajak Perusahaan	HKA62115
15	Hukum Keuangan Negara dan Daerah	HKA62218
15	Hukum Pemerintahan Nagari	HKA62224
15	Hukum Pengadaan Tanah	HKA62117
15	Hukum Pemerintahan Berbasis Elektronik	HKA62221
15	Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	HKA62220
15	Perbandingan Hukum Administrasi Negara	HKA62222
15	Hukum Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	HKA61226
15	Hukum Keterbukaan Informasi Publik	HKA61227
15	Hukum Penempatan Pekerja Migran	HKA61228
15	Hukum Tata Ruang	HKA62114
16	Hukum Kehutanan dan Konservasi SDA	HKA62111
16	Hukum Pertambangan	HKA62112
16	Hukum Sumberdaya Air	HKA62116
16	Hukum Pertanian dan Perkebunan	HKA62219
16	Hukum Reforma Agraria	HKA62223
16	Hukum Pemanfaatan Ruang Udara	HKA61230
16	Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HKA61229
16	Hukum Minyak dan Gas Bumi	HKA61231
16	Hukum Panas Bumi	HKA61232
16	Hukum Sumber Daya Energi	HKA61225

Bahan Kajian	Mata Kuliah	Kode Matkul
17	Hukum Kesehatan	HKD62208
18	Kuliah Kerja Nyata	AND60101
18	Sosiologi Hukum	HKD61214
18	Psikologi Hukum	HKD61216
18	Bantuan Hukum	HKD62209
18	Hukum Kebencanaan	HKD62213
19	Hukum Perancangan Kontrak	HKP62109
19	Diklat Kemahiran Hukum Internasional	HKI62106
19	Perancangan Perundang-Undangan	HKT62106
20	Praktik Peradilan Perdata	HKL61101
20	Praktik Peradilan Pidana	HKL61102
20	Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi	HKL61103
20	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	HKL61104
21	Klinik Hukum Perdata	HKL62205
21	Klinik Anti Korupsi	HKL62206
21	Klinik Hukum Lingkungan	HKL62207
21	Klinik Pemilu Dan Kepartaian	HKL62208
21	Klinik Etik Dan Advokasi Peradilan	HKL62209
21	Klinik Hukum Ketenagakerjaan	HKL61210
21	Klinik Perundang-Undangan	HKL61211
21	Klinik Alternatif Penyelesaian Sengketa	HKL61212
21	Klinik Perlindungan Kelompok Rentan	HKL61213
21	Klinik Advokasi dan Bantuan Hukum	HKL61214
22	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa	HKP62230
22	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	HKI62213
23	Kewirausahaan	AND60102
24	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	HKD61104
24	Tugas Akhir	HKD60107
25	Pendidikan Agama	MWU60101
25	Pancasila	MWU60102
25	Pendidikan Kewarganegaraan	MWU60103
25	Filsafat Hukum	HKD61105
25	Etika Profesi Hukum	HKD62106
26	Bahasa Indonesia	MWU60104
26	Bahasa Inggris	HKD61103
26	Bahasa Inggris Hukum	HKI62110
26	Bahasa Belanda	HKD62211
27	Penalaran dan Retorika Hukum	HKD62212
28	Hukum Transaksi Elektronik	HKP62231
28	Hukum Perlindungan Data Pribadi	HKD61215
28	Hukum Teknologi dan AI	HKD62210
28	Literasi Digital Untuk Hukum	HKD61217
28	Transformasi Digital Bidang Hukum	HKD61218

4.3 PENETAPAN BEBAN SKS MATA KULIAH

Sub-bab ini menetapkan bobot SKS berdasarkan Jam Pembelajaran (*learning hours*). Jam Pembelajaran: total jam kegiatan belajar mahasiswa untuk mata kuliah ini (termasuk kuliah, tugas, praktikum, belajar mandiri). Bobot 1 SKS setara dengan 45 jam belajar per semester. Bobot SKS setiap mata kuliah masing-masing dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 4. 5 SKS Mata Kuliah

Mata Kuliah	Kode Matkul	SKS	Learning Hours / Semester
Pengantar Ilmu Hukum	HKD61101	3	135
Pengantar Hukum Indonesia	HKD61102	3	135
Ilmu Negara	HKT61101	3	135
Hukum Perdata	HKP62102	3	135
Hukum Islam	HKP62101	2	90
Hukum Adat	HKP61107	2	90
Hukum Administrasi Negara	HKA62101	3	135
Hukum Agraria	HKA61102	2	90
Hukum Internasional	HKI62101	3	135
Hukum Perdata Internasional	HKI61103	2	90
Hukum Pidana	HKN62101	3	135
Kriminologi	HKN61106	2	90
Hukum Tata Negara	HKT62102	3	135
Hukum Dagang	HKP62103	2	90
Hukum Perjanjian	HKP61105	2	90
Hukum Korporasi	HKP61106	2	90
Hukum Perbankan	HKP61111	2	90
Hukum Adat Minangkabau	HKP61110	2	90
Hukum tentang Pidana dan Pemidanaan	HKN61103	2	90
Hukum Pidana Khusus	HKN62104	2	90
Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP	HKN62105	2	90
Hukum dan Hak Asasi Manusia	HKT62104	2	90
Ilmu Perundang-Undangan	HKT61103	2	90
Hukum Laut	HKI61102	2	90
Hukum Ekonomi Internasional	HKI62105	2	90
Hukum Hak Kekayaan Intelektual	HKI62104	2	90
Hukum Pemerintahan Daerah	HKA62105	2	90
Hukum Lingkungan	HKA62104	2	90
Hukum Ketenagakerjaan	HKA61103	2	90
Hukum Pajak	HKA61108	2	90
Hukum Acara Perdata	HKP61104	3	135
Hukum Acara Peradilan Agama	HKP62108	2	90
Hukum Acara Pidana	HKN61102	3	135
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	HKT62105	2	90

Mata Kuliah	Kode Matkul	SKS	Learning Hours / Semester
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	HKA62106	2	90
Hukum Jaminan	HKP62112	2	90
Hukum Perwakilan dan Badan Hukum	HKP62113	2	90
Hukum Perumahan dan Kondominium	HKP62114	2	90
Perbandingan Hukum Perdata	HKP62115	2	90
Hukum Waris BW	HKP62116	2	90
Hukum Keluarga dan Perkawinan	HKP62117	2	90
Hukum Hak Keperdataan Atas Tanah	HKP62233	2	90
Hukum Persaingan Usaha	HKP62118	2	90
Hukum Asuransi	HKP62119	2	90
Hukum Pasar Modal	HKP62120	2	90
Hukum Kepailitan	HKP62121	2	90
Hukum Investasi	HKP62122	2	90
Hukum Perlindungan Konsumen	HKP62123	2	90
Hukum Koperasi dan UKM	HKP61234	2	90
Hukum Pengangkutan	HKP61235	2	90
Hukum Surat-Surat Berharga	HKP62232	2	90
Hukum Pembiayaan	HKP61236	2	90
Hukum Jasa Konstruksi	HKP61237	2	90
Hukum Tanah Adat	HKP62124	2	90
Hukum Jasa Keuangan Syariah	HKP62125	2	90
Hukum Zakat dan Wakaf	HKP62126	2	90
Hukum Ekonomi Islam	HKP62127	2	90
Hukum Waris Adat dan Islam	HKP62128	2	90
Perbandingan Hukum Adat	HKP62129	2	90
Hukum Pidana Ekonomi	HKN62107	2	90
Hukum Pidana Korupsi	HKN62108	2	90
Hukum Pidana Adat	HKN62109	2	90
Hukum Pidana Korporasi	HKN62110	2	90
Hukum Pidana Islam	HKN62111	2	90
Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	HKN62112	2	90
Hukum Pidana Internasional	HKN62213	2	90
Hukum Kepolisian	HKN62214	2	90
Hukum Masyarakat	HKN62215	2	90
Hukum Perlindungan Saksi dan Korban	HKN62216	2	90
Penegakan Hukum Pidana	HKN62217	2	90
Hukum Pidana Narkotika dan Psikotropika	HKN62218	2	90

Mata Kuliah	Kode Matkul	SKS	Learning Hours / Semester
Politik Hukum Pidana	HKN61219	2	90
Kriminalistik	HKN61220	2	90
Ilmu Kedokteran Kehakiman	HKN61221	2	90
Perbandingan Hukum Pidana	HKN61222	2	90
Hukum Pidana Militer	HKN61223	2	90
Hukum Konstitusi	HKT62108	2	90
Kekuasaan Kehakiman	HKT62109	2	90
Hukum Kepemiluan	HKT62113	2	90
Hukum Kepartaian	HKT61217	2	90
Lembaga Perwakilan	HKT62110	2	90
Lembaga Kepresidenan	HKT62111	2	90
Perbandingan Hukum Tata Negara	HKT62112	2	90
Hukum Tata Negara Adat dan Hukum Tata Negara Islam	HKT62214	2	90
Ilmu Politik	HKT62215	2	90
Politik Hukum	HKT61107	2	90
Hukum Pers dan Demokrasi	HKT61216	2	90
Hak Menguji Perundang-Undangan	HKT61218	2	90
Hukum Kelembagaan Negara	HKT61219	2	90
Hukum Diplomatik Konsuler	HKI62107	2	90
Hukum Humaniter	HKI62108	2	90
Hukum Perjanjian Internasional	HKI62109	2	90
Hukum Organisasi Internasional	HKI62111	2	90
Hukum Udara dan Angkasa	HKI62212	2	90
Hukum Lingkungan Internasional	HKI61216	2	90
Hukum Kemaritiman	HKI61217	2	90
Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata	HKI61218	2	90
Hubungan Internasional	HKI62214	2	90
Studi Kawasan Samudera Hindia	HKI61219	2	90
Hukum Internasional dan Keberlanjutan	HKI62215	2	90
Hukum Pendaftaran Tanah	HKA62110	2	90
Hukum Kepegawaian	HKA62108	2	90
Hukum Perizinan	HKA62109	2	90
Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	HKA62113	2	90
Hukum Pajak Perusahaan	HKA62115	2	90
Hukum Keuangan Negara dan Daerah	HKA62218	2	90
Hukum Pemerintahan Nagari	HKA62224	2	90
Hukum Pengadaan Tanah	HKA62117	2	90
Hukum Pemerintahan Berbasis Elektronik	HKA62221	2	90

Mata Kuliah	Kode Matkul	SKS	Learning Hours / Semester
Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	HKA62220	2	90
Perbandingan Hukum Administrasi Negara	HKA62222	2	90
Hukum Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	HKA61226	2	90
Hukum Keterbukaan Informasi Publik	HKA61227	2	90
Hukum Penempatan Pekerja Migran	HKA61228	2	90
Hukum Tata Ruang	HKA62114	2	90
Hukum Kehutanan dan Konservasi SDA	HKA62111	2	90
Hukum Pertambangan	HKA62112	2	90
Hukum Sumberdaya Air	HKA62116	2	90
Hukum Pertanian dan Perkebunan	HKA62219	2	90
Hukum Reforma Agraria	HKA62223	2	90
Hukum Pemanfaatan Ruang Udara	HKA61230	2	90
Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HKA61229	2	90
Hukum Minyak dan Gas Bumi	HKA61231	2	90
Hukum Panas Bumi	HKA61232	2	90
Hukum Sumber Daya Energi	HKA61225	2	90
Hukum Kesehatan	HKD62208	2	90
Hukum Kebencanaan	HKD62213	2	90
Kuliah Kerja Nyata	AND60101	4	180
Sosiologi Hukum	HKD61214	2	90
Psikologi Hukum	HKD61216	2	90
Bantuan Hukum	HKD62209	2	90
Hukum Perancangan Kontrak	HKP62109	2	90
Diklat Kemahiran Hukum Internasional	HKI62106	2	90
Perancangan Perundang-Undangan	HKT62106	2	90
Praktik Peradilan Perdata	HKL61101	2	90
Praktik Peradilan Pidana	HKL61102	2	90
Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi	HKL61103	2	90
Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	HKL61104	2	90
Klinik Hukum Perdata	HKL62205	2	90
Klinik Anti Korupsi	HKL62206	2	90
Klinik Hukum Lingkungan	HKL62207	2	90
Klinik Pemilu dan Kepartaian	HKL62208	2	90
Klinik Etik dan Advokasi Peradilan	HKL62209	2	90
Klinik Hukum Ketenagakerjaan	HKL61210	2	90
Klinik Perundang-Undangan	HKL61211	2	90

Mata Kuliah	Kode Matkul	SKS	Learning Hours / Semester
Klinik Alternatif Penyelesaian Sengketa	HKL61212	2	90
Klinik Perlindungan Kelompok Rentan	HKL61213	2	90
Klinik Advokasi dan Bantuan Hukum	HKL61214	2	90
Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa	HKP62230	2	90
Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	HKI62213	2	90
Kewirausahaan	AND60102	3	135
Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	HKD61104	3	135
Tugas Akhir	HKD60107	4	180
Pendidikan Agama	MWU60101	2	90
Pancasila	MWU60102	2	90
Pendidikan Kewarganegaraan	MWU60103	2	90
Filsafat Hukum	HKD61105	2	90
Etika Profesi Hukum	HKD62106	2	90
Bahasa Indonesia	MWU60104	2	90
Bahasa Inggris	HKD61103	2	90
Bahasa Inggris Hukum	HKI62110	2	90
Bahasa Belanda	HKD62211	2	90
Penalaran dan Retorika Hukum	HKD62212	2	90
Hukum Transaksi Elektronik	HKP62231	2	90
Hukum Perlindungan Data Pribadi	HKD61215	2	90
Hukum Teknologi dan AI	HKD62210	2	90
Literasi Digital Untuk Hukum	HKD61217	2	90
Transformasi Digital Bidang Hukum	HKD61218	2	90

4.4 DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER

Mata kuliah yang telah ditentukan berdasarkan bahan kajian sebagaimana yang telah diuraikan pada Sub Bab 4.2 didistribusikan pada masing-masing semester, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Distribusi Mata Kuliah Per Semester

Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
I	MWU60101	Pendidikan Agama	2
I	MWU60102	Pancasila	2
I	MWU60103	Pendidikan Kewarganegaraan	2
I	MWU60104	Bahasa Indonesia	2
I	HKD61101	Pengantar Ilmu Hukum	3
I	HKD61102	Pengantar Hukum Indonesia	3
I	HKD61103	Bahasa Inggris	2
I	HKT61101	Ilmu Negara	3

Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
Jumlah SKS			19
II	HKP62101	Hukum Islam	2
II	HKP62102	Hukum Perdata	3
II	HKP62103	Hukum Dagang	2
II	HKN62101	Hukum Pidana	3
II	HKT62102	Hukum Tata Negara	3
II	HKI62101	Hukum Internasional	3
II	HKA62101	Hukum Administrasi Negara	3
Jumlah SKS			19
III	HKP61104	Hukum Acara Perdata	3
III	HKP61105	Hukum Perjanjian	2
III	HKP61106	Hukum Korporasi	2
III	HKP61107	Hukum Adat	2
III	HKN61102	Hukum Acara Pidana	3
III	HKN61103	Hukum tentang Pidana dan Pemidanaan	2
III	HKT61103	Ilmu Perundang-Undangan	2
III	HKI61102	Hukum Laut	2
III	HKI61103	Hukum Perdata Internasional	2
III	HKA61102	Hukum Agraria	2
III	HKA61103	Hukum Ketenagakerjaan	2
Jumlah SKS			24
IV	HKP62108	Hukum Acara Peradilan Agama	2
IV	HKP62109	Hukum Perancangan Kontrak	2
IV	HKN62104	Hukum Pidana Khusus	2
IV	HKN62105	Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP	2
IV	HKT62104	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2
IV	HKT62105	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
IV	HKT62106	Perancangan Perundang-Undangan	2
IV	HKI62104	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2
IV	HKI62105	Hukum Ekonomi Internasional	2
IV	HKA62104	Hukum Lingkungan	2
IV	HKA62105	Hukum Pemerintahan Daerah	2
IV	HKA62106	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
Jumlah SKS			24
V	HKD61104	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3
V	HKD61105	Filsafat Hukum	2
V	HKP61110	Hukum Adat Minangkabau	2
V	HKP61111	Hukum Perbankan	2
V	HKN61106	Kriminologi	2
V	HKL61101	Praktik Peradilan Perdata	2
V	HKL61102	Praktik Peradilan Pidana	2

Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
V	HKL61103	Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi	2
V	HKL61104	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	2
V	HKT61107	Politik Hukum	2
V	HKA61108	Hukum Pajak	2
Jumlah SKS			23
VI	AND60102	Kewirausahaan	3
VI	HKD62106	Etika Profesi Hukum	2
VI		Wajib PK	2
VI		Wajib PK	2
VI		Wajib PK	2
VI		Wajib PK	2
VI		Wajib PK	2
VI		Wajib PK	2
VI		Mata Kuliah Pilihan	2
VI		Mata Kuliah Pilihan	2
VI		Mata Kuliah Pilihan	2
Jumlah SKS			23
VII	AND60101	Kuliah Kerja Nyata	4
VII		Mata Kuliah Pilihan	2
VII		Mata Kuliah Pilihan	2
Jumlah SKS			8
VIII	HKD60107	Tugas Akhir	4
Jumlah SKS			4
Total SKS			144

Distribusi mata kuliah pilihan prodi, mata kuliah wajib program kekhususan, mata kuliah pilihan program kekhususan, dan mata kuliah pilihan laboratorium hukum dijabarkan secara lengkap pada tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4. 7 Daftar Mata Kuliah Pilihan Prodi, WPK, PPK, dan Pilihan Laboratorium Hukum

Mata Kuliah Pilihan Prodi						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelola MK	CPL
				MK		SKS
VI	HKD62208	Hukum Kesehatan	2	PD	Prodi	2
VI	HKD62209	Bantuan Hukum	2	PD	Prodi	2
VI	HKD62210	Hukum Teknologi dan AI	2	PD	Prodi	2

Mata Kuliah Pilihan Prodi						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelol a MK	CPL
				MK		SK S
VI	HKD62211	Bahasa Belanda	2	PD	Prodi	2
VI	HKD62212	Penalaran dan Retorika Hukum	2	PD	Prodi	2
VI	HKD62213	Hukum Kebencanaan	2	PD	Prodi	2
VII	HKD61214	Sosiologi Hukum	2	PD	Prodi	2
VII	HKD61215	Hukum Perlindungan Data Pribadi	2	PD	Prodi	2
VII	HKD61216	Psikologi Hukum	2	PD	Prodi	2
VII	HKD61217	Literasi Digital Untuk Hukum	2	PD	Prodi	2
VII	HKD61218	Transformasi Digital Bidang Hukum	2	PD	Prodi	2

Mata Kuliah WPK dan PPK Departemen Hukum Perdata						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelola MK	CPL
				MK		SKS
VI	HKP62112	Hukum Jaminan	2	WPK-1	Perdata	2
VI	HKP62113	Hukum Perwakilan dan Badan Hukum	2	WPK-1	Perdata	2
VI	HKP62114	Hukum Perumahan dan Kondominium	2	WPK-1	Perdata	2
VI	HKP62115	Perbandingan Hukum Perdata	2	WPK-1	Perdata	2
VI	HKP62116	Hukum Waris BW	2	WPK-1	Perdata	2
VI	HKP62117	Hukum Keluarga dan Perkawinan	2	WPK-1	Perdata	2
VI	HKP62118	Hukum Persaingan Usaha	2	WPK-2	Perdata	2
VI	HKP62119	Hukum Asuransi	2	WPK-2	Perdata	2
VI	HKP62120	Hukum Pasar Modal	2	WPK-2	Perdata	2
VI	HKP62121	Hukum Kepailitan	2	WPK-2	Perdata	2
VI	HKP62122	Hukum Investasi	2	WPK-2	Perdata	2
VI	HKP62123	Hukum Perlindungan Konsumen	2	WPK-2	Perdata	2
VI	HKP62124	Hukum Tanah Adat	2	WPK-3	Perdata	2

Mata Kuliah WPK dan PPK Departemen Hukum Perdata						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelola MK	CPL
				MK		SKS
VI	HKP62125	Hukum Jasa Keuangan Syariah	2	WPK-3	Perdata	2
VI	HKP62126	Hukum Zakat dan Wakaf	2	WPK-3	Perdata	2
VI	HKP62127	Hukum Ekonomi Islam	2	WPK-3	Perdata	2
VI	HKP62128	Hukum Waris Adat dan Islam	2	WPK-3	Perdata	2
VI	HKP62129	Perbandingan Hukum Adat	2	WPK-3	Perdata	2
VI	HKP62230	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	PPK-1,2,3	Perdata	2
VI	HKP62231	Hukum Transaksi Elektronik	2	PPK-1,2	Perdata	2
VI	HKP62232	Hukum Surat-Surat Berharga	2	PPK-1,2,3	Perdata	2
VI	HKP62233	Hukum Hak Keperdataan Atas Tanah	2	PPK-1,2	Perdata	2
VII	HKP61234	Hukum Koperasi dan UKM	2	PPK-1,2	Perdata	2
VII	HKP61235	Hukum Pengangkutan	2	PPK-1,2	Perdata	2
VII	HKP61236	Hukum Pembiayaan	2	PPK-1,2	Perdata	2
VII	HKP61237	Hukum Jasa Konstruksi	2	PPK-1,2	Perdata	2

Mata Kuliah WPK dan PPK Departemen Hukum Pidana						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelola MK	CPL
				MK		SKS
VI	HKN62107	Hukum Pidana Ekonomi	2	WPK-4	Pidana	2
VI	HKN62108	Hukum Pidana Korupsi	2	WPK-4	Pidana	2
VI	HKN62109	Hukum Pidana Adat	2	WPK-4	Pidana	2
VI	HKN62110	Hukum Pidana Korporasi	2	WPK-4	Pidana	2
VI	HKN62111	Hukum Pidana Islam	2	WPK-4	Pidana	2
VI	HKN62112	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	2	WPK-4	Pidana	2

Mata Kuliah WPK dan PPK Departemen Hukum Pidana						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelola MK	CPL
				MK		SKS
VI	HKN62213	Hukum Pidana Internasional	2	PPK-4	Pidana	2
VI	HKN62214	Hukum Kepolisian	2	PPK-4	Pidana	2
VI	HKN62215	Hukum Pemasyarakatan	2	PPK-4	Pidana	2
VI	HKN62216	Hukum Perlindungan Saksi dan Korban	2	PPK-4	Pidana	2
VI	HKN62217	Penegakan Hukum Pidana	2	PPK-4	Pidana	2
VI	HKN62218	Hukum Pidana Narkotika dan Psikotropika	2	PPK-4	Pidana	2
VII	HKN61219	Politik Hukum Pidana	2	PPK-4	Pidana	2
VII	HKN61220	Kriminalistik	2	PPK-4	Pidana	2
VII	HKN61221	Ilmu Kedokteran Kehakiman	2	PPK-4	Pidana	2
VII	HKN61222	Perbandingan Hukum Pidana	2	PPK-4	Pidana	2
VII	HKN61223	Hukum Pidana Militer	2	PPK-4	Pidana	2

Mata Kuliah WPK dan PPK Departemen Hukum Tata Negara						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelola MK	CPL
				MK		SKS
VI	HKT62108	Hukum Konstitusi	2	WPK-5	HTN	2
VI	HKT62109	Kekuasaan Kehakiman	2	WPK-5	HTN	2
VI	HKT62110	Lembaga Perwakilan	2	WPK-5	HTN	2
VI	HKT62111	Lembaga Kepresidenan	2	WPK-5	HTN	2
VI	HKT62112	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	WPK-5	HTN	2
VI	HKT62113	Hukum Kepemiluan	2	WPK-5	HTN	2
VI	HKT62214	Hukum Tata Negara Adat dan Hukum Tata Negara Islam	2	PPK-5	HTN	2
VI	HKT62215	Ilmu Politik	2	PPK-5	HTN	2
VII	HKT61216	Hukum Pers dan Demokrasi	2	PPK-5	HTN	2
VII	HKT61217	Hukum Keparitaan	2	PPK-5	HTN	2

VII	HKT61218	Hak Menguji Perundang-Undangan	2	PPK-5	HTN	2
VII	HKT61219	Hukum Kelembagaan Negara	2	PPK-5	HTN	2

Mata Kuliah WPK dan PPK Departemen Hukum Internasional						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelola MK	CPL
				MK		SKS
VI	HKI62106	Diklat Kemahiran Hukum Internasional	2	WPK-6	HI	2
VI	HKI62107	Hukum Diplomatik Konsuler	2	WPK-6	HI	2
VI	HKI62108	Hukum Humaniter	2	WPK-6	HI	2
VI	HKI62109	Hukum Perjanjian Internasional	2	WPK-6	HI	2
VI	HKI62110	Bahasa Inggris Hukum	2	WPK-6	HI	2
VI	HKI62111	Hukum Organisasi Internasional	2	WPK-6	HI	2
VI	HKI62212	Hukum Udara Dan Angkasa	2	PPK-6	HI	2
VI	HKI62213	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2	PPK-6	HI	2
VI	HKI62214	Hubungan Internasional	2	PPK-6	HI	2
VI	HKI62215	Hukum Internasional dan Keberlanjutan	2	PPK-6	HI	2
VII	HKI61216	Hukum Lingkungan Internasional	2	PPK-6	HI	2
VII	HKI61217	Hukum Kemaritiman	2	PPK-6	HI	2
VII	HKI61218	Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata	2	PPK-6	HI	2
VII	HKI61219	Studi Kawasan Samudera Hindia	2	PPK-6	HI	2

Mata Kuliah WPK dan PPK Hukum Administrasi Negara						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelola MK	CPL
				MK		SKS
VI	HKA62108	Hukum Kepegawaian	2	WPK-7	HAN	2
VI	HKA62109	Hukum Perizinan	2	WPK-7	HAN	2
VI	HKA62110	Hukum Pendaftaran Tanah	2	WPK-7,8	HAN	2

Mata Kuliah WPK dan PPK Hukum Administrasi Negara						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelola MK	CPL
				MK		SKS
VI	HKA62111	Hukum Kehutanan dan Konservasi SDA	2	WPK-8	HAN	2
VI	HKA62112	Hukum Pertambangan	2	WPK-8	HAN	2
VI	HKA62113	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	2	WPK-7	HAN	2
VI	HKA62114	Hukum Tata Ruang	2	WPK-7,8	HAN	2
VI	HKA62115	Hukum Pajak Perusahaan	2	WPK-7	HAN	2
VI	HKA62116	Hukum Sumberdaya Air	2	WPK-8	HAN	2
VI	HKA62117	Hukum Pengadaan Tanah	2	WPK-8	HAN	2
VI	HKA62218	Hukum Keuangan Negara dan Daerah	2	PPK-7,8	HAN	2
VI	HKA62219	Hukum Pertanian dan Perkebunan	2	PPK-8	HAN	2
VI	HKA62220	Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2	PPK-7	HAN	2
VI	HKA62221	Hukum Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	PPK-8	HAN	2
VI	HKA62222	Perbandingan Hukum Administrasi Negara	2	PPK-7	HAN	2
VI	HKA62223	Hukum Reforma Agraria	2	PPK-7,8	HAN	2
VI	HKA62224	Hukum Pemerintahan Nagari	2	PPK- 7,8	HAN	2
VII	HKA61225	Hukum Sumber Daya Energi	2	PPK-8	HAN	2
VII	HKA61226	Hukum Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	2	PPK-7	HAN	2
VII	HKA61227	Hukum Keterbukaan Informasi Publik	2	PPK-7	HAN	2
VII	HKA61228	Hukum Penempatan Pekerja Migran	2	PPK-7	HAN	2

Mata Kuliah WPK dan PPK Hukum Administrasi Negara						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelola MK	CPL
				MK		SKS
VII	HKA61229	Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2	PPK-8	HAN	2
VII	HKA61230	Hukum Pemanfaatan Ruang Udara	2	PPK-8	HAN	2
VII	HKA61231	Hukum Minyak dan Gas Bumi	2	PPK-8	HAN	2
VII	HKA61232	Hukum Panas Bumi	2	PPK-8	HAN	2

Mata Kuliah Pilihan Laboratorium Hukum						
Smtr	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Status	Pengelola MK	CPL
				MK		SKS
VI	HKL62205	Klinik Hukum Perdata	2	PLH	LH	2
VI	HKL62206	Klinik Anti Korupsi	2	PLH	LH	2
VI	HKL62207	Klinik Hukum Lingkungan	2	PLH	LH	2
VI	HKL62208	Klinik Pemilu dan Kepartaian	2	PLH	LH	2
VI	HKL62209	Klinik Etik dan Advokasi Peradilan	2	PLH	LH	2
VII	HKL61210	Klinik Hukum Ketenagakerjaan	2	PLH	LH	2
VII	HKL61211	Klinik Perundang-Undangan	2	PLH	LH	2
VII	HKL61212	Klinik Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	PLH	LH	2
VII	HKL61213	Klinik Perlindungan Kelompok Rentan	2	PLH	LH	2
VII	HKL61214	Klinik Advokasi dan Bantuan Hukum	2	PLH	LH	2

BAB V

PRASYARAT DAN PENJELASAN MATA KULIAH

Bab ini menjelaskan:

- 1) Mata kuliah prasyarat;
- 2) Mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan
- 3) Prasyarat penyelesaian tugas akhir.

5.1 Mata Kuliah Prasyarat

5.1.1 Mata Kuliah Prasyarat untuk Mata Kuliah Berikutnya

1. Mata kuliah yang mempunyai hubungan prasyarat dapat diambil setelah mata kuliah prasyarat dimaksud lulus dengan nilai minimal C.
2. Mata kuliah yang mempunyai hubungan prasyarat meliputi:
 - a. Hukum Acara Perdata prasyarat untuk Praktik Peradilan Perdata;
 - b. Hukum Acara Pidana prasyarat untuk Praktik Peradilan Pidana;
 - c. Ilmu Perundang-Undangan prasyarat untuk Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi prasyarat untuk Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi;
 - e. Hukum Internasional prasyarat untuk Diklat Kemahiran Hukum Internasional; dan
 - f. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara prasyarat untuk Praktik Peradilan Tata Usaha Negara.

5.1.2 Mata Kuliah Prasyarat Program Kekhususan

Dekan menetapkan Program Kekhususan (PK) bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah menyelesaikan beban studi minimal 86 sks;
- b. telah dinyatakan lulus dengan nilai minimal huruf (B) semua mata kuliah prasyarat PK yang dipilih.
- c. Mahasiswa mengusulkan 2 pilihan Program Kekhususan (PK) setelah berkonsultasi dengan Dosen PA.
- d. mata kuliah prasyarat masing-masing PK meliputi:
 1. Hukum Perdata
 - a) Hukum Perdata;
 - b) Hukum Dagang;
 - c) Hukum Perjanjian;
 - d) Hukum Acara Perdata.
 2. Hukum Bisnis
 - a) Hukum Perdata;
 - b) Hukum Dagang;
 - c) Hukum Korporasi;
 - d) Hukum Perjanjian.
 3. Hukum Adat dan Islam

- a) Hukum Perdata;
- b) Hukum Adat;
- c) Hukum Perjanjian;
- d) Hukum Islam.
- 4. Hukum Pidana
 - a) Hukum Pidana;
 - b) Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP;
 - c) Hukum tentang Pidana dan Pemidanaan;
 - d) Hukum Pidana Khusus.
- 5. Hukum Tata Negara
 - a) Ilmu Negara;
 - b) Hukum Tata Negara;
 - c) Ilmu Perundang – Undangan;
 - d) Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6. Hukum Internasional
 - a) Hukum Internasional;
 - b) Hukum Laut;
 - c) Hukum Ekonomi Internasional;
 - d) Hukum Hak Kekayaan Intelektual.
- 7. Hukum Administrasi Negara
 - a) Hukum Administrasi Negara;
 - b) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c) Hukum Pemerintahan Daerah;
 - d) Hukum Ketenagakerjaan.
- 8. Hukum Agraria dan Sumberdaya Alam
 - a) Hukum Administrasi Negara;
 - b) Hukum Agraria;
 - c) Hukum Lingkungan;
 - d) Hukum Pemerintahan Daerah.

5.2 Kelompok Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan

5.2.1 Mata Kuliah Wajib

Mata kuliah wajib adalah kelompok mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Kelompok mata kuliah ini terdiri dari:

1. Mata Kuliah Wajib Universitas dengan kode “MWU dan AND” yaitu:
 - a. Pendidikan Agama
 - b. Pancasila
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan
 - d. Bahasa Indonesia
 - e. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - f. Kewirausahaan
2. Mata Kuliah Wajib Prodi Hukum dengan kode “HKD” yaitu:
 - a. Pengantar Ilmu Hukum
 - b. Pengantar Hukum Indonesia
 - c. Bahasa Inggris

- d. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
 - e. Filsafat Hukum
 - f. Etika Profesi Hukum
 - g. Tugas Akhir
3. Mata Kuliah Wajib Prodi Hukum yang dikelola oleh Departemen Hukum Perdata dengan kode “HKP” yaitu:
- a. Hukum Islam
 - b. Hukum Perdata
 - c. Hukum Dagang
 - d. Hukum Acara Perdata
 - e. Hukum Perjanjian
 - f. Hukum Korporasi
 - g. Hukum Adat
 - h. Hukum Acara Peradilan Agama
 - i. Hukum Perancangan Kontrak
 - j. Hukum Perbankan
 - k. Hukum Adat Minangkabau
4. Mata Kuliah Wajib Prodi Hukum yang dikelola oleh Departemen Hukum Pidana dengan kode “HKN” yaitu:
- a. Hukum Pidana
 - b. Kriminologi
 - c. Hukum Acara Pidana
 - d. Hukum tentang Pidana dan Pemidanaan
 - e. Hukum Pidana Khusus
 - f. Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP
5. Mata Kuliah Wajib Prodi Hukum yang dikelola oleh Departemen Hukum Tata Negara dengan kode “HKT” yaitu:
- a. Ilmu Negara
 - b. Hukum Tata Negara
 - c. Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - d. Ilmu Perundang-Undangan
 - e. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 - f. Perancangan Perundang-Undangan
 - g. Politik Hukum
6. Mata Kuliah Wajib Prodi Hukum yang dikelola oleh Departemen Hukum Internasional dengan kode “HKI” yaitu:
- a. Hukum Internasional
 - b. Hukum Laut
 - c. Hukum Perdata Internasional
 - d. Hukum Hak Kekayaan Intelektual
 - e. Hukum Ekonomi Internasional
7. Mata Kuliah Wajib Prodi Hukum yang dikelola oleh Departemen Hukum Administrasi Negara dengan kode “HKA” yaitu:
- a. Hukum Administrasi Negara
 - b. Hukum Agraria

- c. Hukum Ketenagakerjaan
 - d. Hukum Lingkungan
 - e. Hukum Pemerintahan Daerah
 - f. Hukum Pajak
8. Mata Kuliah Wajib Prodi Hukum yang dikelola oleh Laboratorium Hukum dengan kode “HKL” yaitu:
- a. Praktik Peradilan Perdata
 - b. Praktik Peradilan Pidana
 - c. Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi
 - d. Praktik Peradilan Tata Usaha Negara

5.2.2 Mata Kuliah Pilihan

Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa sebagai penunjang mata kuliah wajib terdiri atas:

- 1. Mata kuliah pilihan Prodi;
 - 2. Mata Kuliah pilihan Program Kekhususan.
 - 3. Mata Kuliah pilihan Laboratorium Hukum;
- Lihat Tabel 4.7 Daftar Mata Kuliah Pilihan Prodi, WPK, PPK, dan Pilihan Laboratorium Hukum

5.2.3 Mata Kuliah Wajib dan Pilihan PK

Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Kekhususan adalah kelompok mata kuliah yang diambil setelah mahasiswa mendapatkan PK. Ketentuan mengenai Program Kekhususan adalah sebagai berikut:

- a. Prodi Hukum memiliki 8 PK yang masing-masingnya di bawah pengelolaan departemen-departemen sebagai berikut:
 - 1. PK Hukum Perdata, di bawah Departemen Hukum Perdata (PK 1)
 - 2. PK Hukum Bisnis, di bawah Departemen Hukum Perdata (PK 2)
 - 3. PK Hukum Adat dan Islam, di bawah Departemen Hukum Perdata (PK 3)
 - 4. PK Hukum Pidana, di bawah Departemen Hukum Pidana (PK 4)
 - 5. PK Hukum Tata Negara, di bawah Departemen HTN (PK 5)
 - 6. PK Hukum Internasional, di bawah Departemen HI (PK 6)
 - 7. PK Hukum Administrasi Negara, di bawah Departemen HAN (PK 7)
 - 8. PK Hukum Agraria dan Sumberdaya Alam, di bawah Departemen HAN (PK 8)

Kelompok Mata Kuliah PK terbagi atas Mata Kuliah Wajib PK (WPK) dan Mata Kuliah Pilihan PK (PPK). Ketentuan tentang pengambilan Mata Kuliah Wajib PK (WPK) dan Mata Kuliah Pilihan PK (PPK) adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang telah ditetapkan PK harus mengambil mata kuliah wajib PK dan pilihan PK.
- 2) Mata kuliah wajib PK yang harus diambil berjumlah sebanyak 6 (enam) mata kuliah dengan total bobot 12 (dua

- belas) sks untuk setiap PK.
- 3) Mata Kuliah Pilihan yang harus diambil sebanyak 5 (lima) mata kuliah yang memiliki total bobot 10 (sepuluh) sks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) paling sedikit mengambil 2 (dua) mata kuliah pilihan PK yang bersangkutan; dan
 - b) 3 (tiga) mata kuliah pilihan lainnya antara lain:
 - 1) Mata kuliah pilihan PK yang bersangkutan;
 - 2) Mata kuliah pilihan PK lain;
 - 3) Mata kuliah wajib PK lain;
 - 4) Mata kuliah pilihan prodi; dan/atau
 - 5) Mata kuliah pilihan laboratorium hukum.

5.3 Prasyarat Penyelesaian Tugas Akhir

Penyelesaian tugas akhir oleh Prodi Hukum oleh mahasiswa dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Seminar Proposal

- a. Proposal Penelitian Tugas Akhir dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah ditetapkan PK dan sedang/telah mengambil mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.
- b. Mahasiswa yang telah ditetapkan PK dapat mendaftar Seminar Proposal Penelitian dengan syarat:
 - 1) Proposal Tugas Akhir disetujui oleh pembimbing;
 - 2) mengikuti Kegiatan Seminar Proposal Penelitian mahasiswa lain minimal 5 (lima) kali; dan
 - 3) persyaratan akademik dan administratif lainnya.
- c. Proposal Penelitian Tugas Akhir mahasiswa yang dinyatakan layak oleh tim penguji dapat dilanjutkan ke tahap penelitian tugas akhir.

2. Seminar Hasil

Seminar hasil penelitian dilaksanakan setelah mahasiswa melakukan penelitian dan telah mendapatkan persetujuan kelayakan dari pembimbing.

3. Sidang Ujian Komprehensif
- a. Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Sarjana wajib lulus ujian komprehensif.
 - b. Ujian komprehensif dapat diselenggarakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan beban studi minimal 140 (seratus empat puluh) sks dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai IPK minimal 2,00 (dua koma nol);
 - 2) Tidak mempunyai nilai D dan/atau E;
 - 3) Menyerahkan bukti skor TOEFL minimal 425 (empat ratus dua puluh lima) dari lembaga yang ditentukan;
 - 4) Menyerahkan bukti SAPS;
 - 5) Persetujuan pembimbing berdasarkan matriks perbaikan setelah seminar hasil; dan
 - 6) Syarat dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Dekan.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Peserta Workshop Evaluasi Kurikulum

1. Workshop evaluasi Kurikulum tanggal 27 Oktober 2023
 - a. Narasumber yaitu Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH, MH., LL.M, Ph. D (Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta) dan Dr. Nadia Astriani, SH, M.Si. (Ketua Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran).
 - b. Workshop ini dihadiri oleh:
 - 1) Pimpinan Fakultas Hukum: Dr. Ferdi, SH. MH (Dekan Fakultas Hukum), Dr. Nani Mulyati, SH, M. CL (Wakil Dekan 1), Dr. Khairul Fahmi, SH. MH (Wakil Dekan 2), Dr. Syofirman Syofyan, SH. MH (Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum), Dr. Siska Elvandari, SH. MH (Sekretaris Prodi);
 - 2) Dosen dan Guru besar Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH, Prof. Dr. Busyra Azheri, SH. MH, Prof. Dr. Aria Zurnetti, SH. MH, Dr. Khairani, SH. MH, Dr. Wetria Fauzi, SH. MH, Dr. Edita Elda, SH. MH, Dr. Syofianti, SH. MH, Dr. Delfiyanti, SH. MH, Dr. Devianty Fitry, SH. MH, Arfiani, SH. MH, Hendria Fitrhina, SH. MH, Riki Afrizal, SH. MH, Sri Oktavia, SH, M.Sc, Ph. D., Dayu Medina, SH. MH, Almaududi, SH. MH, Sucy Delyarahmi, SH. MH, Dr Yasniwati, SH. MH, Dr. Hengki Andora, Dr. Charles Simabura, SH, M.H, Efren Nova, SH, M.H, dan Rahmi Murniati, SH. MH;
 - 3) Pihak Eksternal yaitu: pengguna lulusan Fazrinnoor Sosilo Dewantoro, SH. MH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang); Dr. Ridwan Ramli, SH. MH (Ketua Pengadilan Tinggi Padang), Tri Firdaus Akbarsyah, SH, MH (Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Barat); Ezeddin Zain, SH, M.E (Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat); dan lain-lain
 - 4) Perwakilan Mahasiswa dan alumni.
2. Lokakarya Kurikulum tanggal 26 – 27 Februari 2024
 - a. Narasumber yaitu Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si sebagai Narasumber dan Reviewer (Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
 - b. Lokakarya ini dihadiri oleh:
 - 1) Pimpinan Fakultas Hukum: Dr. Ferdi, SH. MH (Dekan Fakultas Hukum), Dr. Nani Mulyati, SH, M. CL (Wakil Dekan 1), Dr. Fahmi, SH. MH (Wakil Dekan 2), Dr. Syofirman Syofyan, SH. MH (Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum), Dr. Siska Elvandari, SH. MH (Sekretaris Prodi), Prof. Dr. Zainul Daulays, SH, MH, Prof. Dr. Busyra Azheri, SH. MH, Prof. Dr. Aria Zurnetti, SH. MH, Dr. Khairani, SH. MH, Dr. Delfiyanti, SH, M.H, Dr. Yasniwati, SH. MH, Dr. Wetria Fauzi, SH, MH, Dr. Hengki Andora, SH, M.H, Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, M.H, Dr. Anton Rosari, SH, M.H, Gusminarti, SH, M.H, Syafira Hijriya, SH, MH; Dayu Medina, SH, M.H, Almaududi, SH, M.H, Upita Anggunsuri, SH, M.H;

- 2) Pihak Eksternal yaitu: Asnawi, SH, MH (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat), Mhd Fatria, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Padang), Miko Kamal, SH, LL.M, Ph. D (Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Padang; dan;
- 3) Perwakilan Mahasiswa dan alumni.

Lampiran 2. Tabel Pemetaan Profil Lulusan (PL) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Capaian Lulusan (CPL)	Profil Lulusan			
		P1	P2	P3	P4
CPL-01	Kemampuan menguasai konsep hukum, karakteristik hukum, struktur hukum, sumber hukum, sistem hukum dan sejarah perkembangan hukum.	v			
CPL-02	Kemampuan menguasai asas, norma dan prosedur penyelesaian masalah hukum atau kasus hukum	v			
CPL-03	Kemampuan menguasai dan menerapkan metode penelitian hukum secara tepat serta mampu menulis laporan penelitian dan dokumen hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai etika akademik.		v		
CPL-04	Kemampuan memahami filsafat hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum secara kontekstual, sistematis dan komprehensif	v			
CPL-05	Kemampuan menyelesaikan masalah hukum atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif		v	v	
CPL-06	Kemampuan merumuskan gagasan secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum serta mampu mengkomunikasikannya sesuai dengan standar etika akademik		v	v	
CPL-07	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab serta mampu kerja sama dengan teman sejawat.		v		
CPL-08	Kemampuan untuk bersikap adil, bertanggung jawab, empati, etis dan taat hukum, peduli terhadap kemanusiaan dan lingkungan dalam menjalankan profesi	v	v		v
CPL-09	Kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum dan teknologi yang memperhatikan nilai kemanusiaan			v	
CPL-10	Kemampuan menerapkan jiwa kewirausahaan dalam menjalani praktik profesi			v	

Lampiran 3. Tabel Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan Bahan Kajian (BK)

Bahan Kajian	Sub-Bahan Kajian	CPL-01	CPL-02	CPL-03	CPL-04	CPL-05	CPL-06	CPL-07	CPL-08	CPL-09	CPL-10
BK 1	Pengenalan Ilmu Hukum	v									
BK 2	Dasar-Dasar Ilmu Hukum	v									
BK 3	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Perdata	v									
BK 4	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana	v									
BK 5	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara	v									
BK 6	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Internasional	v									
BK 7	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara	v									
BK 8	Hukum Acara	v									
BK 9	Ilmu di Bidang Hukum Perdata	v									
BK 10	Ilmu di Bidang Hukum Bisnis	v									
BK 11	Ilmu di Bidang Hukum Adat dan Islam	v									
BK 12	Ilmu di Bidang Hukum Pidana	v									
BK 13	Ilmu di Bidang Hukum Tata Negara	v									
BK 14	Ilmu di Bidang Hukum Internasional	v									

Bahan Kajian	Sub-Bahan Kajian	CPL-01	CPL-02	CPL-03	CPL-04	CPL-05	CPL-06	CPL-07	CPL-08	CPL-09	CPL-10
BK 15	Ilmu di Bidang Hukum Administrasi Negara	v									
BK 16	Ilmu di Bidang Hukum Agraria Dan Sumberdaya Alam	v									
BK 17	Ilmu di Bidang Hukum Kesehatan	v									
BK 18	Hukum dan Masyarakat		V		v	v		v	v		
BK 19	Perancangan Dokumen Hukum		V			v		v			
BK 20	Keterampilan Beracara		V			v		v			
BK 21	Klinik dan Kemahiran Hukum		V			v		v			
BK 22	Alternatif Penyelesaian Sengketa		V			v		v			
BK 23	Dasar-Dasar Wirausaha		V			v		v			v
BK 24	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum			v							
BK 25	Agama, Filsafat dan Etika				v				v		
BK 26	Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi						v				
BK 27	Logika, Penalaran dan Argumentasi						v				
BK 28	Teknologi Informatika									v	

Lampiran 4. Tabel Distribusi Bahan Kajian (BK) ke Mata Kuliah (MK)

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HKD61101	Pengantar Ilmu Hukum	v																											
HKD61102	Pengantar Hukum Indonesia	v																											
HKT61101	Ilmu Negara	v																											
HKP62102	Hukum Perdata		v																										
HKP62101	Hukum Islam		v																										
HKP61107	Hukum Adat		v																										
HKA62101	Hukum Administrasi Negara		v																										
HKA61102	Hukum Agraria		v																										
HKI62101	Hukum Internasional		v																										
HKI61103	Hukum Perdata Internasional		v																										
HKN62101	Hukum Pidana		v																										
HKN61106	Kriminologi		v																										
HKT62102	Hukum Tata Negara		v																										
HKP62103	Hukum Dagang			v																									
HKP61105	Hukum Perjanjian			v																									
HKP61106	Hukum Korporasi			v																									
HKP61111	Hukum Perbankan			v																									

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HKP61110	Hukum Adat Minangkabau			v																									
HKN61103	Hukum tentang Pidana dan Pemidanaan				v																								
HKN62104	Hukum Pidana Khusus				v																								
HKN62105	Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP				v																								
HKT62104	Hukum dan Hak Asasi Manusia					v																							
HKT61103	Ilmu Perundang-Undangan					v																							
HKI61102	Hukum Laut						v																						
HKI62105	Hukum Ekonomi Internasional						v																						
HKI62104	Hukum Hak Kekayaan Intelektual							v																					
HKA62105	Hukum Pemerintahan Daerah							v																					
HKA62104	Hukum Lingkungan							v																					
HKA61103	Hukum Ketenagakerjaan							v																					
HKA61108	Hukum Pajak							v																					

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HKP61104	Hukum Acara Perdata								v																				
HKP62108	Hukum Acara Peradilan Agama								v																				
HKN61102	Hukum Acara Pidana								v																				
HKT62105	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi								v																				
HKA62106	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara								v																				
HKP62112	Hukum Jaminan									v																			
HKP62113	Hukum Perwakilan dan Badan Hukum									v																			
HKP62114	Hukum Perumahan dan Kondominium									v																			
HKP62115	Perbandingan Hukum Perdata									v																			
HKP62116	Hukum Waris BW									v																			
HKP62117	Hukum Keluarga dan Perkawinan									v																			
HKP62233	Hukum Hak Keperdataan Atas Tanah									v																			

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HKP62118	Hukum Persaingan Usaha										v																		
HKP62119	Hukum Asuransi										v																		
HKP62120	Hukum Pasar Modal										v																		
HKP62121	Hukum Kepailitan										v																		
HKP62122	Hukum Investasi										v																		
HKP62123	Hukum Perlindungan Konsumen										v																		
HKP62124	Hukum Koperasi dan UKM										v																		
HKP62125	Hukum Pengangkutan										v																		
HKP62232	Hukum Surat-Surat Berharga										v																		
HKP62126	Hukum Pembiayaan										v																		
HKP62127	Hukum Jasa Konstruksi										v																		
HKP62128	Hukum Tanah Adat											v																	
HKP62129	Hukum Jasa Keuangan Syariah											v																	
HKP62130	Hukum Zakat dan Wakaf											v																	
HKP62131	Hukum Ekonomi Islam											v																	

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HKP62128	Hukum Waris Adat dan Islam											v																	
HKP62129	Perbandingan Hukum Adat											v																	
HKN62107	Hukum Pidana Ekonomi												v																
HKN62108	Hukum Pidana Korupsi												v																
HKN62109	Hukum Pidana Adat												v																
HKN62110	Hukum Pidana Korporasi												v																
HKN62111	Hukum Pidana Islam												v																
HKN62112	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan												v																
HKN62213	Hukum Pidana Internasional												v																
HKN62214	Hukum Kepolisian												v																
HKN62215	Hukum Masyarakat												v																
HKN62216	Hukum Perlindungan Saksi dan Korban												v																
HKN62217	Penegakan Hukum Pidana												v																

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HKN62218	Hukum Pidana Narkotika dan Psikotropika												v																
HKN61219	Politik Hukum Pidana												v																
HKN61220	Kriminalistik												v																
HKN61221	Ilmu Kedokteran Kehakiman												v																
HKN61222	Perbandingan Hukum Pidana												v																
HKN61223	Hukum Pidana Militer												v																
HKT62108	Hukum Konstitusi													v															
HKT62109	Kekuasaan Kehakiman													v															
HKT62113	Hukum Kepemiluan													v															
HKT61217	Hukum Kepartaian													v															
HKT62110	Lembaga Perwakilan													v															
HKT62111	Lembaga Kepresidenan													v															
HKT62112	Perbandingan Hukum Tata Negara													v															
HKT62214	Hukum Tata Negara Adat dan													v															

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Hukum Tata Negara Islam																												
HKT62215	Ilmu Politik													v															
HKT61107	Politik Hukum													v															
HKT61216	Hukum Pers dan Demokrasi													v															
HKT61218	Hak Menguji Perundang-Undangan													v															
HKT61219	Hukum Kelembagaan Negara													v															
HKI62107	Hukum Diplomatik Konsuler														v														
HKI62108	Hukum Humaniter														v														
HKI62109	Hukum Perjanjian Internasional														v														
HKI62111	Hukum Organisasi Internasional														v														
HKI62212	Hukum Udara dan Angkasa														v														
HKI61216	Hukum Lingkungan Internasional														v														
HKI61217	Hukum Kemaritiman														v														

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HKI61218	Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata														v														
HKI62214	Hubungan Internasional														v														
HKI61219	Studi Kawasan Samudera Hindia														v														
HKI62215	Hukum Internasional dan Keberlanjutan														v														
HKA62110	Hukum Pendaftaran Tanah															V													
HKA62108	Hukum Kepegawaian															V													
HKA62109	Hukum Perizinan															V													
HKA62113	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah															V													
HKA62115	Hukum Pajak Perusahaan															V													
HKA62218	Hukum Keuangan Negara dan Daerah															V													
HKA62224	Hukum Pemerintahan Nagari															V													

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HKA62117	Hukum Pengadaan Tanah															V													
HKA62221	Hukum Pemerintahan Berbasis Elektronik															V													
HKA62220	Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial															V													
HKA62222	Perbandingan Hukum Administrasi Negara															V													
HKA61226	Hukum Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah															V													
HKA61227	Hukum Keterbukaan Informasi Publik															V													
HKA61228	Hukum Penempatan Pekerja Migran															V													
HKA62114	Hukum Tata Ruang															V													
HKA62111	Hukum Kehutanan dan Konservasi SDA															V													

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HKA62112	Hukum Pertambangan																v												
HKA62116	Hukum Sumberdaya Air																v												
HKA62219	Hukum Pertanian dan Perkebunan																v												
HKA62223	Hukum Reforma Agraria																v												
HKA61230	Hukum Pemanfaatan Ruang Udara																v												
HKA61229	Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																v												
HKA61231	Hukum Minyak dan Gas Bumi																v												
HKA61232	Hukum Panas Bumi																v												
HKA61225	Hukum Sumber Daya Energi																v												
HKD62208	Hukum Kesehatan																	v											
AND60101	Kuliah Kerja Nyata																		v										
HKD61214	Sosiologi Hukum																		v										
HKD61216	Psikologi Hukum																		v										
HKD62209	Bantuan Hukum																		v										

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HKD62213	Hukum Kebencanaan																		v										
HKP62109	Hukum Perancangan Kontrak																			v									
HKI62106	Diklat Kemahiran Hukum Internasional																			v									
HKT62106	Perancangan Perundang-Undangan																			v									
HKL61101	Praktik Peradilan Perdata																				v								
HKL61102	Praktik Peradilan Pidana																				v								
HKL61103	Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi																				v								
HKL61104	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara																				v								
HKL62205	Klinik Hukum Perdata																					v							
HKL62206	Klinik Anti Korupsi																					v							
HKL62207	Klinik Hukum Lingkungan																					v							
HKL62208	Klinik Pemilu dan Kepartaian																					v							

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HKL62209	Klinik Etik dan Advokasi Peradilan																					v							
HKL61210	Klinik Hukum Ketenagakerjaan																					v							
HKL61211	Klinik Perundang-Undangan																					v							
HKL61212	Klinik Alternatif Penyelesaian Sengketa																					v							
HKL61213	Klinik Perlindungan Kelompok Rentan																					v							
HKL61214	Klinik Advokasi dan Bantuan Hukum																					v							
HKP62230	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa																						v						
HKI62213	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional																						v						
AND60102	Kewirausahaan																							v					
HKD61104	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum																								v				
HKD60107	Tugas Akhir																								v				

Kode Matkul	Mata Kuliah	Bahan Kajian																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
MWU60101	Pendidikan Agama																									v			
MWU60102	Pancasila																									v			
MWU60103	Pendidikan Kewarganegaraan																									v			
HKD61105	Filsafat Hukum																										v		
HKD62106	Etika Profesi Hukum																										v		
MWU60104	Bahasa Indonesia																										v		
HKD61103	Bahasa Inggris																										v		
HKI62110	Bahasa Inggris Hukum																										v		
HKD62211	Bahasa Belanda																										v		
HKD62212	Penalaran dan Retorika Hukum																											v	
HKP62231	Hukum Transaksi Elektronik																												v
HKD61215	Hukum Perlindungan Data Pribadi																												v
HKD62210	Hukum Teknologi dan AI																												v
HKD61217	Literasi Digital Untuk Hukum																												v
HKD61218	Transformasi Digital Bidang Hukum																												v

Lampiran 5. Tabel Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan Mata Kuliah (MK)

Kode Matkul	Mata Kuliah	Smt	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HKD61101	Pengantar Ilmu Hukum	I	v									
HKD61102	Pengantar Hukum Indonesia	I	v									
HKT61101	Ilmu Negara	I	v									
HKP62102	Hukum Perdata	II	v									
HKP62101	Hukum Islam	II	v									
HKP61107	Hukum Adat	III	v									
HKA62101	Hukum Administrasi Negara	II	v									
HKA61102	Hukum Agraria	III	v									
HKI62101	Hukum Internasional	II	v									
HKI61103	Hukum Perdata Internasional	III	v									
HKN62101	Hukum Pidana	II	v									
HKN61106	Kriminologi	V	v									
HKT62102	Hukum Tata Negara	II	v									
HKP62103	Hukum Dagang	II	v									
HKP61105	Hukum Perjanjian	III	v									
HKP61106	Hukum Korporasi	III	v									
HKP61111	Hukum Perbankan	V	v									
HKP61110	Hukum Adat Minangkabau	V	v									
HKN61103	Hukum tentang Pidana dan Pemidanaan	III	v									
HKN62104	Hukum Pidana Khusus	IV	v									
HKN62105	Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP	IV	v									
HKT62104	Hukum dan Hak Asasi Manusia	IV	v									
HKT61103	Ilmu Perundang-Undangan	III	v									
HKI61102	Hukum Laut	III	v									

Kode Matkul	Mata Kuliah	Smt	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HKI62105	Hukum Ekonomi Internasional	IV	v									
HKI62104	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	IV	v									
HKA62105	Hukum Pemerintahan Daerah	IV	v									
HKA62104	Hukum Lingkungan	IV	v									
HKA61103	Hukum Ketenagakerjaan	III	v									
HKA61108	Hukum Pajak	V	v									
HKP61104	Hukum Acara Perdata	III	v									
HKP62108	Hukum Acara Peradilan Agama	IV	v									
HKN61102	Hukum Acara Pidana	III	v									
HKT62105	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	IV	v									
HKA62106	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	IV	v									
HKP62112	Hukum Jaminan	VI	v									
HKP62113	Hukum Perwakilan dan Badan Hukum	VI	v									
HKP62114	Hukum Perumahan dan Kondominium	VI	v									
HKP62115	Perbandingan Hukum Perdata	VI	v									
HKP62116	Hukum Waris BW	VI	v									
HKP62117	Hukum Keluarga dan Perkawinan	VI	v									
HKP62233	Hukum Hak Keperdataan Atas Tanah	VI	v									
HKP62118	Hukum Persaingan Usaha	VI	v									
HKP62119	Hukum Asuransi	VI	v									
HKP62120	Hukum Pasar Modal	VI	v									
HKP62121	Hukum Kepailitan	VI	v									
HKP62122	Hukum Investasi	VI	v									
HKP62123	Hukum Perlindungan Konsumen	VI	v									
HKP61234	Hukum Koperasi dan UKM	VII	v									

Kode Matkul	Mata Kuliah	Smt	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HKP61235	Hukum Pengangkutan	VII	v									
HKP62232	Hukum Surat-Surat Berharga	VI	v									
HKP61236	Hukum Pembiayaan	VII	v									
HKP61237	Hukum Jasa Konstruksi	VII	v									
HKP62124	Hukum Tanah Adat	VI	v									
HKP62125	Hukum Jasa Keuangan Syariah	VI	v									
HKP62126	Hukum Zakat dan Wakaf	VI	v									
HKP62127	Hukum Ekonomi Islam	VI	v									
HKP62128	Hukum Waris Adat dan Islam	VI	v									
HKP62129	Perbandingan Hukum Adat	VI	v									
HKN62107	Hukum Pidana Ekonomi	VI	v									
HKN62108	Hukum Pidana Korupsi	VI	v									
HKN62109	Hukum Pidana Adat	VI	v									
HKN62110	Hukum Pidana Korporasi	VI	v									
HKN62111	Hukum Pidana Islam	VI	v									
HKN62112	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	VI	v									
HKN62213	Hukum Pidana Internasional	VI	v									
HKN62214	Hukum Kepolisian	VI	v									
HKN62215	Hukum Masyarakat	VI	v									
HKN62216	Hukum Perlindungan Saksi dan Korban	VI	v									
HKN62217	Penegakan Hukum Pidana	VI	v									
HKN62218	Hukum Pidana Narkotika dan Psikotropika	VI	v									
HKN61219	Politik Hukum Pidana	VII	v									
HKN61220	Kriminalistik	VII	v									
HKN61221	Ilmu Kedokteran Kehakiman	VII	v									

Kode Matkul	Mata Kuliah	Smt	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HKN61222	Perbandingan Hukum Pidana	VII	v									
HKN61223	Hukum Pidana Militer	VII	v									
HKT62108	Hukum Konstitusi	VI	v									
HKT62109	Kekuasaan Kehakiman	VI	v									
HKT62113	Hukum Kepemiluan	VI	v									
HKT61217	Hukum Kepartaian	VII	v									
HKT62110	Lembaga Perwakilan	VI	v									
HKT62111	Lembaga Kepresidenan	VI	v									
HKT62112	Perbandingan Hukum Tata Negara	VI	v									
HKT62214	Hukum Tata Negara Adat dan Hukum Tata Negara Islam	VI	v									
HKT62215	Ilmu Politik	VI	v									
HKT61107	Politik Hukum	V	v									
HKT61216	Hukum Pers dan Demokrasi	VII	v									
HKT61218	Hak Menguji Perundang-Undangan	VII	v									
HKT61219	Hukum Kelembagaan Negara	VII	v									
HKI62107	Hukum Diplomatik Konsuler	VI	v									
HKI62108	Hukum Humaniter	VI	v									
HKI62109	Hukum Perjanjian Internasional	VI	v									
HKI62111	Hukum Organisasi Internasional	VI	v									
HKI62212	Hukum Udara dan Angkasa	VI	v									
HKI61216	Hukum Lingkungan Internasional	VII	v									
HKI61217	Hukum Kemaritiman	VII	v									
HKI61218	Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata	VII	v									
HKI62214	Hubungan Internasional	VI	v									
HKI61219	Studi Kawasan Samudera Hindia	VII	v									

Kode Matkul	Mata Kuliah	Smt	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HKI62215	Hukum Internasional dan Keberlanjutan	VI	v									
HKA62110	Hukum Pendaftaran Tanah	VI	v									
HKA62108	Hukum Kepegawaian	VI	v									
HKA62109	Hukum Perizinan	VI	v									
HKA62113	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	VI	v									
HKA62115	Hukum Pajak Perusahaan	VI	v									
HKA62218	Hukum Keuangan Negara dan Daerah	VI	v									
HKA62224	Hukum Pemerintahan Nagari	VI	v									
HKA62117	Hukum Pengadaan Tanah	VI	v									
HKA62221	Hukum Pemerintahan Berbasis Elektronik	VI	v									
HKA62220	Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	VI	v									
HKA62222	Perbandingan Hukum Administrasi Negara	VI	v									
HKA61226	Hukum Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	VII	v									
HKA61227	Hukum Keterbukaan Informasi Publik	VII	v									
HKA61228	Hukum Penempatan Pekerja Migran	VII	v									
HKA62114	Hukum Tata Ruang	VI	v									
HKA62111	Hukum Kehutanan dan Konservasi SDA	VI	v									
HKA62112	Hukum Pertambangan	VI	v									
HKA62116	Hukum Sumberdaya Air	VI	v									
HKD62213	Hukum Kebencanaan	VI	v									
HKA62219	Hukum Pertanian dan Perkebunan	VI	v									
HKA62223	Hukum Reforma Agraria	VI	v									
HKA61230	Hukum Pemanfaatan Ruang Udara	VII	v									
HKA61229	Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	VII	v									

Kode Matkul	Mata Kuliah	Smt	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HKA61231	Hukum Minyak dan Gas Bumi	VII	v									
HKA61232	Hukum Panas Bumi	VII	v									
HKA61225	Hukum Sumber Daya Energi	VII	v									
HKD62208	Hukum Kesehatan	VI	v									
AND60101	Kuliah Kerja Nyata	VII		v		v	v		v	v		
HKD61214	Sosiologi Hukum	VII		v		v	v		v	v		
HKD61216	Psikologi Hukum	VII		v		v	v		v	v		
HKD62209	Bantuan Hukum	VI		v		v	v		v	v		
HKP62109	Hukum Perancangan Kontrak	IV		v			v		v			
HKI62106	Diklat Kemahiran Hukum Internasional	VI		v			v		v			
HKT62106	Perancangan Perundang-Undangan	IV		v			v		v			
HKL61101	Praktik Peradilan Perdata	V		v			v		v			
HKL61102	Praktik Peradilan Pidana	V		v			v		v			
HKL61103	Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi	V		v			v		v			
HKL61104	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	V		v			v		v			
HKL62205	Klinik Hukum Perdata	VI		v			v		v			
HKL62206	Klinik Anti Korupsi	VI		v			v		v			
HKL62207	Klinik Hukum Lingkungan	VI		v			v		v			
HKL62208	Klinik Pemilu dan Kepartaian	VI		v			v		v			
HKL62209	Klinik Etik dan Advokasi Peradilan	VI		v			v		v			
HKL61210	Klinik Hukum Ketenagakerjaan	VII		v			v		v			
HKL61211	Klinik Perundang-Undangan	VII		v			v		v			
HKL61212	Klinik Alternatif Penyelesaian Sengketa	VII		v			v		v			
HKL61213	Klinik Perlindungan Kelompok Rentan	VII		v			v		v			
HKL61214	Klinik Advokasi dan Bantuan Hukum	VII		v			v		v			

Kode Matkul	Mata Kuliah	Smt	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HKP62230	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa	VI		v			v		v			
HKI62213	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	VI		v			v		v			
AND60102	Kewirausahaan	VI		v			v		v			v
HKD61104	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	V			v							
HKD60107	Tugas Akhir	VIII			v							
MWU60101	Pendidikan Agama	I				v				v		
MWU60102	Pancasila	I				v				v		
MWU60103	Pendidikan Kewarganegaraan	I				v				v		
HKD61105	Filsafat Hukum	V				v				v		
HKD62106	Etika Profesi Hukum	VI				v				v		
MWU60104	Bahasa Indonesia	I						v				
HKD61103	Bahasa Inggris	I						v				
HKI62110	Bahasa Inggris Hukum	VI						v				
HKD62211	Bahasa Belanda	VI						v				
HKD62212	Penalaran dan Retorika Hukum	VI						v				
HKP62231	Hukum Transaksi Elektronik	VI									V	
HKD61215	Hukum Perlindungan Data Pribadi	VII									V	
HKD62210	Hukum Teknologi dan AI	VI									V	
HKD61217	Literasi Digital Untuk Hukum	VII									V	
HKD61218	Transformasi Digital Bidang Hukum	VII									V	

Lampiran 6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER FAKULTAS HUKUM PRODI/DEPARTEMEN: Hukum					
MATA KULIAH/SIKLUS/STASE	KODE	URL <i>I-Learn</i> Mata Kuliah/Siklus/Stase	BOBOT (sks)	S m tr	Tanggal Penyesuaian
PENGANTAR HUKUM INDONESIA	HKD61102	https://fhuk.ilearn.unand.ac.id/course	3	1	24-08-2024
OTORISASI	Pengembang RPS		Ketua Prodi		
	Elwi Danil, Dr., S.H., M.H. Prof. Yoserwan, Dr., S.H., M.H. LLM Delfiyanti, Dr., S.H., M.H. Hendria Fitriana, S.H., M.H. Yussi Adelina Mannas Dr., S.H., M.H. Iwan Kurniawan., S.H., M.H. Rembrandt, S.H., M.H., MPd. Efren Nova, S.H., M.H.. Misnar Syam, S.H., M.H. Edita Elda, Dr., S.H., M.H.		Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL-1	Kemampuan menguasai Konsep hukum, karakteristik hukum, struktur hukum, sumber hukum, sistem hukum dan sejarah perkembangan hukum.			√
	CPL-2	Kemampuan menguasai asas, norma dan prosedur penyelesaian masalah hukum atau kasus hukum			√
	CPL-5	Kemampuan menyelesaikan masalah hukum atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif.			√

	CPL-7	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab serta mampu bekerjasama dengan teman sejawat.	√
	CP-MK		
	CP-MK	Mahasiswa dapat memahami tentang Pendahuluan yang meliputi istilah dan pengertian Pengantar Hukum Indonesia, tujuan pengantar hukum Indonesia, sistem hukum, norma atau kaidah, sejarah sistem hukum dan politik hukum di Indonesia, kodifikasi, unifikasi dan prulalisme hukum di Indonesia, serta bidang-bidang hukum di Indonesia dan perkembangan sistem hukum	
	CP-MK	Mahasiswa dapat menjelaskan sumber-sumber hukum tata urutan peraturan perundang-undangan serta peng peraturan perundang-undangan	
	CP-MK	Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup hukum negara meliputi istilah dan definisi serta batasan hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi ne serta dapat menjelaskan sejarah perkembangan hukum negara di Indonesia, sistem pemerintahan negara, lembaga negara, otonomi daerah, warga negara dan hak manusia, dan hukum acara mahkamah konstitusi	
	CP-MK	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup hu administrasi negara meliputi sejarah perkembangan hu administrasi negara di Indonesia, asas-asas hu administrasi negara, asas-asas pemerintahan yang hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum agraria hukum pajak	
	CP-MK	Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup hukum p meliputi pengertian dan sejarah perkembangan hukum p Indonesia, tujuan hukum pidana, pembagian hukum pi asas- asas hukum pidana, tindak pidana pertanggungjawaban pidana, KUHP (WvS), hukum p khusus, dan hukum acara pidana.	
	CP-MK	Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup hukum per meliputi pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia; Kitab Undang undang Hukum Perdata (BW); Hukum Pribadi; Hukum Be Hukum Perjanjian; Hukum Keluarga dan Waris; .Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata.	
	CP-MK	Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup hukum internasional, meliputi: Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Internasional; Hukum Internasional dan Hukum Nasional; Subyek Hukum Internasional; Asas-asas Hukum Internasional; dan Organisasi-organisasi Internasional.	

	CP-MK	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang
	CP-MK	Mahasiswa mampu membedakan antara Indonesia dan Pengantar Ilmu Hukum
Diskripsi Singkat Mata Kuliah/Si klus/ Stase	Mata kuliah “PHI” ini merupakan mata kuliah dasar yang wajib dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Pengantar Hukum Indonesia memperkenalkan secara umum atau garis besar pengetahuan tentang dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Objek dari Pengantar Hukum Indonesia adalah peraturan-peraturan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia).	
Bahan Kajian	Pengertian, sejarah, asas, subjek, sumber, organisasi, dan penyelesaian sengketa dalam Pengantar Hukum Indonesia	
Pustaka	Utama :	
	1) Bachsan Mustafa, 1984, <i>Sistem Hukum Indonesia</i>, Remadja Karya, Bandung. 2) Dedi Sumardi, 2007, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Ind-Hill-Co, Jakarta. 3) Hartono Hadisupraptop, 1996, <i>Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi 4</i>, Liberty, Yogyakarta. 4) Kusumadi Pudjosewojo, 2004, <i>Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia</i>, Sinar Grafika, Jakarta. 5) Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, <i>Perundang-undangan dan Yurisprudensi</i>, Citra Aditya Bakti, Bandung. 6) Sri Hartini Dwiyatmi, 2006, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Cet.I, Ghalia Indonesia, bogor 7) R. Abdoel Djamali, 2001, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 8) R. Soepomo, 1991, <i>Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II</i>, Cetakan 14, Pradnya Paramita, Jakarta. 9) Roeslan Saleh, 1983, <i>Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana</i>, Aksara Baru 10) Yulies Tiena Masriani, 2016, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Sinar Grafika, Jakarta. 11) Samidjo, 1985, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Armico, Bandung. 12) CST Kansil, 2011, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Rineka Cipta, Jakarta. 13) Soetandyo Wignjo Soebroto, 1994, <i>Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia</i>, Raja Gravindo Persada, Jakarta 14) Soediman Kartohadiprodjo, 1965, <i>Pengantar Tata Hukum Indonesia</i>, Pembangunan, Jakarta	

	15) Sajuti Thalib, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta 16) Sri Setianingsih Suwardi, 1986, <i>Inti Sari Hukum Internasional Publik</i> , Penerbit Alumni, Bandung. 17) Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 18) Rahman Syamsuddin, 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Kencana 19) Fahmi Al Amruzi, 2018, Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PTHI), Laksita Indonesia 20) Maemunah, 2020, Hukum Tata Negara, Deepublish 21) Tim Lindsey, Simon Butt Indonesian Law, 2018, Oxford University Press 22) Tundjung Herning Sitabuana, 2020, Hukum Tata Negara Indonesia 23) Fitri Wahyuni.2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT. Nusantara Persada Utama 24) Malcolm N. Shaw, 2017, International Law, Cambridge University Press 25) Gerhard von Glahn, James Larry Taulbee, 2017, Law Among Nations: An Introduction to Public International Law, Routledge 26) Hugh Thirlway, 2019, The Sources of International Law, Oxford University Press	
	Pendukung :	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak :	Perangkat keras :
	1. Power Point 2. Zoom meeting/ Microsoft Team/ Google Class room 3. Ilearn	1.White Board 2.Infocus Proyektor
Team Teaching	Elwi Danil, Dr., S.H., M.H. Prof. Yoserwan, Dr., S.H., M.H. LLM. Delfiyanti, Dr., S.H., M.H. Hendria Fitriana, S.H., M.H. Yussi Adelina Mannas Dr., S.H., M.H. Iwan Kurniawan., S.H., M.H. Rembrandt, S.H., M.H., MPd. Efren Nova, S.H., M.H. Misnar Syam, S.H., M.H. Edita Elda, Dr., S.H., M.H.	
Mata kuliah/si	-	

klus/stas e syarat								
Mg Ke- (1)	CP- MK dan Sub- CP- MK (2)	Indik ator Penil aian (3)	Bentu k Penilai an (4)	Aktivitas Pembelajaran [Estimasi Waktu] (5)			Mate ri Pemb elajar an [Refe rensi] (6)	Bob ot Pen ilai an (%) (7)
				Luring	Dari ng (SM/ AM/ AK)*	Medi a		
1,2	Maha siswa dapat mem aham i tenta ng Pend ahulu an yang melip uti istila h dan penge rtian Penga ntar Huku m Indon esia, tujua n penga ntar huku m Indon esia, siste m huku m, norm a	Mem aham i ruang lingk up Peng antar Huku m Indon esia	Kriteri a: Daf tar Peri ksa Ru bri k Non -tes dan tes: Kuis	Tutorial: Kuliah: TM 2x50" Diskusi: TM 1x50"		P r o y e k t o r L C D P a p a n t u li s	istila h- istila h dan penge rtian Penga ntar Huku m Indon esia, tujua n dari penge nalan huku m Indon esia, siste m huku m, norm a atau atura n,seja rah siste m huku m dan politi	10 %

	atau kaidah, sejarah sistem hukum dan politik hukum di Indonesia, kodifikasi, unifikasi dan pluralisme hukum di Indonesia, serta bidang g-bidang g hukum di Indonesia dan Perkembangan sistem hukum di Indonesia						k hukum di Indonesia, kodifikasi, unifikasi dan pluralisme hukum di Indonesia bidang g hukum di Indonesia dan perkembangan sistem hukum di Indonesia Ref. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21	
Dst								
	Evaluasi Tengah Semester							

Dst								
16	Evaluasi Akhir Semester							

Catatan:

Bobot SKS	= 1 SKS Kuliah/Teori (50' TM + 60'PT + 60' BM)/minggu; 1 sks praktik/penelitian/magang dan sejenisnya 170' /minggu; 1 sks seminar atau sejenisnya (100' TM + 70'BM)/minggu
T	= Teori (Aspek Ilmu Pengetahuan)
P	= Praktek (aspek keterampilan kerja)
TM/PB	= Tatap Muka
BM/KM	= Belajar Mandiri
PT	= Penugasan Terstruktur
Bentuk Pembelajaran	= Kuliah, Responsi dan Tutorial, Seminar
Metode Pembelajaran	= Discovery Learning,, Case Method , Small Group Discussion, Project Based Learning
Case method	= metode pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah
Project based learning	= merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dengan beraktivitas secara nyata dalam kehidupan.
Small Group Discussion	= salah satu bentuk model pembelajaran diskusi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya atau peserta didik dengan pengajar yang melibatkan dua atau lebih yang berinteraksi secara menyeluruh dan saling bertatap muka dengan tujuan untuk menganalisis, memecahkan suatu masalah, mengeksplorasi atau memperdebatkan suatu topik tertentu.
Discovery Learning	= mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu, menggunakan intuisi, imajinasi, kreativitas, mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, juga kebenaran baru.
Metode Penilaian	= tes dan nontes
Nilai akhir mahasiswa	= mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020, Pasal 60 ayat (2)